

**Widaningsih**

# 

# KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan modul ajar. Kami ucapkan juga rasa terima kasih kami kepada pihak-pihak yang mendukung lancarnya modul ajar ini mulai dari proses penulisan hingga proses cetak.

Adapun, modul ajar kami yang berjudul ‘Pancasila’ ini telah selesai kami buat secara semaksimal dan sebaik mungkin agar menjadi manfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi dan pengetahuan.

Kami sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari sempurna tentang modul ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya modul ajar ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas modul.

Demikian modul ajar ini kami buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas. Terima kasih.

Penyusun

Desember, 2022

# DAFTAR ISI

[KATA PENGANTAR i](#_Toc116552913)

[DAFTAR ISI ii](#_Toc116552914)

[BAB I PENDIDIKAN PANCASILA DALAM TINJAUAN HISTORIS & CULTURAL 1](#_Toc116552915)

[1.1 Pancasila Secara Historis Dan Kultural 1](#_Toc116552916)

[BAB II PENDIDIKAN PANCASILA DALAM TINJAUAN YURIDIS & FILOSOFIS 3](#_Toc116552917)

[2.1 Pancasila Secara Yuridis Dan Filosofis 3](#_Toc116552918)

[BAB III PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA 7](#_Toc116552919)

[3.1 Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia 7](#_Toc116552920)

[BAB IV PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT 22](#_Toc116552921)

[4.1 Definisi Pancasila Sebagai Sistem Filsafat 22](#_Toc116552922)

[4.2 Karakteristik Sistem Filsafat Pancasila 23](#_Toc116552923)

[4.3 Mengapa Pancasila Dikatakan Sebagai Sistem Filsafat? 23](#_Toc116552924)

[BAB V UUD RI 1945 25](#_Toc116552925)

[5.1 Definisi UUD RI 1945 25](#_Toc116552926)

[5.2 Arti Penting UUD 1945 Bagi Bangsa 26](#_Toc116552927)

[BAB VI AMANDEMEN UUD RI 1945 28](#_Toc116552928)

[6.1 Definisi Amandemen UUD RI 1945 28](#_Toc116552939)

[6.2 Mekanisme Atau Tata Cara Melakukan Amandmen UUD 1945 28](#_Toc116552942)

[6.3 Tujuan Amandemen UUD 1945 29](#_Toc116552943)

[6.4 Risiko Amandemen UUD 1945 30](#_Toc116552944)

[6.5 Kondisi UUD 1945 Sebelum Diamandemen 30](#_Toc116552945)

[BAB VII TRIAS POLITIKA DALAM NEGARA RI 33](#_Toc116552946)

[7.1 Definisi Trias Politika Dalam Negara RI 33](#_Toc116552947)

[7.2 Trias Politika Di Indonesia Sebelum Amandemen 33](#_Toc116552954)

[7.3 Trias Politika Di Indonesia Setelah Amandemen 34](#_Toc116552956)

[BAB VIII KELEMBAGAAN NEGARA MENURUT UUD RI 1945 36](#_Toc116552957)

[8.1 Definisi Kelembagaan Negara Menurut UUD RI 1945 36](#_Toc116552958)

[BAB IX PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL 38](#_Toc116552959)

[9.1 Definisi Pancasila Sebagai Ideologi Nasional 38](#_Toc116552960)

[9.2 Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi Nasional 38](#_Toc116552961)

[9.3 Proses Terbentuknya Pancasila Sebagai Ideologi Nasional 39](#_Toc116552962)

[BAB X IDEOLOGI LAIN YANG BERKEMBANG DI DUNIA 42](#_Toc116552963)

[10.1 Pengertian Ideologi 42](#_Toc116552964)

[10.2 Pendapat Ahli Tentang Pengertian Ideologi 42](#_Toc116552965)

[10.3 Sejarah Ideologi 43](#_Toc116552966)

[10.4 Fungsi Ideologi 45](#_Toc116552967)

[10.5 Jenis-Jenis Ideologi 46](#_Toc116552968)

[BAB XI PANCASILA DAN HAM 51](#_Toc116552969)

[11.1 Definisi Pancasila Dan HAM 51](#_Toc116552970)

[BAB XII PELAKSANAAN HAM DALAM UUD RI 1945 56](#_Toc116552971)

[12.1 Definisi Pelaksanaan HAM Dalam UUD RI 1945 56](#_Toc116552972)

[12.2 Karakteristik Pelaksanaan HAM Dalam UUD RI 1945 60](#_Toc116552973)

[BAB XIII TINDAK PIDANA KORUPSI 65](#_Toc116552974)

[13.1 Definisi Tindak Pidana Korupsi 65](#_Toc116552975)

[13.2 Karakteristik Tindak Pidana Korupsi 68](#_Toc116552976)

[13.3 Bentuk-Bentuk Korupsi 69](#_Toc116552977)

[13.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi 70](#_Toc116552981)

[13.5 Sebab-Sebab Tindak Pidana Korupsi 72](#_Toc116552989)

[BAB IVX PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN 74](#_Toc116552990)

[14.1 Definisi Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan 74](#_Toc116552991)

[DAFTAR PUSTAKA 76](#_Toc116552992)

[METODE PENELITIAN 79](#_Toc116552993)

# BAB I PENDIDIKAN PANCASILA DALAM TINJAUAN HISTORIS & CULTURAL

## Pancasila Secara Historis Dan Kultural[[1]](#footnote-1)

1. Landasan Historis

Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang mulai jaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya penjajah. Bangsa Indonesia berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup, di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Oleh para pendiri bangsa kita (*the founding father*) dirumuskan secara sederhana namun mendalam yang meliputi lima prinsip (sila) dan diberi nama Pancasila.

Dalam era reformasi bangsa Indonesia harus memiliki visi dan pandangan hidup yang kuat (nasionalisme) agar tidak terombang-ambing di tengah masyarakat internasional. Hal ini dapat terlaksana dengan kesadaran berbangsa yang berakar pada sejarah bangsa.

Secara historis nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara obyektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal nilainilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, atau bangsa Indonesia sebagai *kausa materialis*Pancasila.

1. Landasan Kultural

Landasan kultural adalah pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan, dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa, sehingga harus diwariskan ke generasi penerus.

Secara kultural unsur-unsur Pancasila terdapat pada adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan Indonesia secara umum. Pendidikan Pancasila memelihara dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila yang telah dan terus disepakati tersebut.

Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah merupakan hasil konseptual seseorang saja melainkan merupakan suatu hasil karya bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Oleh karena itu generasi penerus terutama kalangan intelektual kampus sudah seharusnya untuk mendalami serta mengkaji karya besar tersebut dalam upaya untuk melestarikan secara dinamis dalam arti mengembangkan sesuai dengan tuntutan jaman. Perlu di ketahui, landasan kultural Pancasila mempunyai unsur-unsur sebagai adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, agama, kepercayaan, dan kebudayaan dalam negara Indonesia yang secara umum.

# BAB II PENDIDIKAN PANCASILA DALAM TINJAUAN YURIDIS & FILOSOFIS

## Pancasila Secara Yuridis Dan Filosofis

1. Landasan Yuridis[[2]](#footnote-2)

Landasan Yuridis menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan Pendidikan Pancasila. Pancasila secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi dasar negara sejak dituangkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945.

Secara hierarkis, landasan yuridis dapat ditelusuri dari UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Keputusan Direktur Jenderal, dan lain-lain.

Landasan Yuridis adalah landasan yang berdasarkan atas aturan yang dibuat setelah melalui perundingan, permusyawarahan. Landasan Yuridis Pancasila terdapat dalam alinea IV Pembukaan UUD’45, antara lain di dalamnya terdapat rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara yang sah sebagai berikut:

* 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Persatuan Indonesia pasal 1, 32, 36.
  4. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Batang tubuh UUD 1945 pun merupakan landasan yuridis konstitusional karena dasar negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut dan rinci dalam pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat di dalam Batang Tubuh UUD 1945 tersebut.

Adapun penjabaran yang terdapat pada batang tubuh UUD 1945 sebagai berikut :

* 1. Sila pertama

Pasal 29 ayat (1) UUD 1945: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.Ayat (2) UUD 1945: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu.

* 1. Sila kedua

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: Segala Warganegara bersamaan kedudukannya didalam Hukum danPemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itudengan tidak ada kecualinya. Ayat (2) UUD 1945: Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

* 1. Sila ketiga

Pasal 30 ayat (1): Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

* 1. Sila keempat

Pasal 22E: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

* 1. Sila kelima

Pasal 33 ayat (1): Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Ayat (2): Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai hajat hudup orang banyak dikuasai oleh Negara. Ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalammya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

1. Landasan Filosofis[[3]](#footnote-3)

Landasan Filosofis adalah landasan yang berdasarkan atas filsafat atau pandangan hidup. Nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filsafat Negara, dalam aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai pancasila termasuk sistem perundang-undanan. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia, oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan, hal ini berdasarkan kenyataan obyektif bahwa manusia adalah mahluk Tuhan YME. Setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu dalam realisasi kenegaraan termasuk dalam proses reformasi dewasa ini merupakan suatu keharusan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan, baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, social budaya, maupun pertahanan keamanan.

Pancasila sebagai norma dasar negara dan dasar negara Republik Indonesia yang berlaku adalah Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan UUD NRI Tahun 1945) *junctis* Keputusan Presiden RI Nomor 150 Tahun 1959 mengenai Dekrit Presiden RI/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Naskah Pembukaan UUD NRI 1945 yang berlaku adalah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang disahkan/ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Sila-sila Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 secara filosofis-sosiologis berkedudukan sebagai Norma Dasar Indonesia dan dalam konteks politis-yuridis sebagai Dasar Negara Indonesia. Konsekuensi dari Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, secara yuridis konstitusional mempunyai kekuatan hukum yang sah, kekuatan hukum berlaku, dan kekuatan hukum mengikat.

Nilai-nilai Pancasila dari segi implementasi terdiri atas nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar terdiri atas nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar ini terdapat pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dan Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa nilai dasar tersebut harus dijabarkan konkret dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, bahkan pada semua peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.

Peraturan perundang-undangan ke tingkat yang lebih rendah pada esensinya adalah merupakan pelaksanaan dari nilai dasar Pancasila yang terdapat pada Pembukaan dan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945, sehingga perangkat peraturan perundang-undangan tersebut dikenal sebagai nilai instrumental Pancasila. Jadi nilai instrumental harus merupakan penjelasan dari nilai dasar; dengan kata lain, semua perangkat perundang-undangan haruslah merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila yang terdapat pada Pembukaan dan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945.

Para penyusun peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) di lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dari tingkat pusat hingga daerah adalah orang-orang yang bertugas melaksanakan penjabaran nilai dasar Pancasila menjadi nilai-nilai instrumental Mereka ini, dengan sendirinya, harus mempunyai pengetahuan, pengertian dan pemahaman, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan yang baik terhadap kandungan nilai-nilai Pancasila. Sebab jika tidak, mereka akan melahirkan nilai-nilai instrumental yang menyesatkan rakyat dari nilai dasar Pancasila.

Jika seluruh warga bangsa taat asas pada nilai-nilai instrumental, taat pada semua peraturan perundang-undangan yang betul-betul merupakan penjabaran dari nilai dasar Pancasila, maka sesungguhnya nilai praksis Pancasila telah wujud pada amaliyah setiap warga. Pemahaman perspektif hukum seperti ini sangat strategis disemaikan pada semua warga negara sesuai dengan usia dan tingkat pendidikannya, termasuk pada para penyusun peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu menjadi suatu kewajaran, bahkan keharusan, jika Pancasila disebarluaskan secara massif antara lain melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal.

Penyelenggaraan pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi lebih penting lagi karena Perguruan Tinggi sebagai agen perubahan yang melahirkan intelektual-intelektual muda yang kelak menjadi tenaga inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap strata lembaga dan badan-badan negara, lembaga-lembaga daerah, lembaga-lembaga infrastruktur politik dan sosial kemasyarakatan, lembaga-lembaga bisnis, dan lainnya.

# BAB III PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

## Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia

1. **Urutan Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia**

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dimulai dari kerajaan-kerajaan. Nilai-nilai pancasila telah ada pada bangsa indonesia sejak zaman dulu kala sebelum bangsa indonesia mendirikan negara. Proses terbentuknya negara indonesia melalui proses sejarah yang cukup panjang yaitu sejak zaman batu hingga munculnya karajaan-kerajaan pada abad ke-IV.[[4]](#footnote-4)

1. **Zaman Kutai**

Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan ini terketak di sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Pada tahun 400 M, masyarakat Kutai membuka zaman sejarah Indonesia untuk pertama kalinya menampilkan nilai-nilai sosial, politik, dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, serta sedekah kepada para Brahmana . Hal tersebut terbukti dengan ditemukannya 7 yupa (tiang batu) yang memiliki arti bahwa saat itu, Raja Mulawarman mengadakan kenduri dan member sedekah pada para Brahmana dan para Brahmana membangun yupa tersebut sebagai tanda terima kasih. (Bambang Sumadjo,dkk.;1977:33-32).

Bentuk kerajaan agama sebagai tali pengikat kewibaawaan ini tampak dalam kerajaan-kerajaan yang muncul kemudian di jawa dan sumatra. Dalam zaman kuno (400-1500) terdapat dua kerajaan yang berhasil mencapai integrasi dan wilayah yang meliputi hampir separoh indonesia dan seluruh wilayah Indonesia sekarang yaitu kerajaan Sriwijaya di sumatra dan majapahit yang berkusa di jawa.[[5]](#footnote-5)

1. **Zaman Sriwijaya**

Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 M. kerajaan ini terletak di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya berkembang dengan pesat karena didukung oleh:[[6]](#footnote-6)

1. Letak sriwijaya yang strategis, sehingga menjadi jalur distribusi ke berbagai daerah wilayah nusantara
2. Runtuhnya kerajaan Funnsn di Indo Cina (Vietnam)
3. Majunya aktivitas pelayaran dan perdagangan antara India dan China
4. Kerajaan Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat.

Menurut Mr.M.Yamin Indonesia terbentuk melalui 3 tahap yaitu :

* 1. Zaman Sriwijaya dibawah Wangsa Syailendra (600-1400), yang bercirikan kedaulatan.
  2. Zaman Majapahit (1293-1525) yang bercirikan keprabuan .
  3. Negara kebangsaan modern yaitu negara Indonesia merdeka (sekarang proklamasi 17 Agustus 1945) (Sekretariat Negara RI 1995:11)

Pada abad ke VII munculah suatu kerajaan Sriwijaya muncul dibawah kekuasaan wangsa Syilendra, hal ini termuat dalam prasasti Kedukan bukit di kaki bukit Siguntang dekat palembang yang bertarikh 605 Caka dan 683 M. Dalam bahasa Melayu kuno dan huruf Pallawa kerajaan ini adalah kerajaan maritime yang mengandalkan kekuatan lautnya seperti selat sunda, selat malaka. Kerajaan Sriwijaya merupakan suatu kerajaan besar yang cukup disegani dikawasan Asia selatan. Perdagangan dilakukan dengan mempersatukan dengan pedagang pengerajin dan pegawai raja yang disebut Tuha An Vatakvurah sebagai pengawas dan pengumpul semacam koperasi sehingga rakyat mudah untuk memasarkan barang dagangannya. Pada saat itu kerajaan dalam menjalankan system negaranya tidak dapat dilepaskan dengan nilai ketuhanan. Cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam suatu negara pada kerajaan Sriwijaya yaitu berbunyi marvual vanua Criwijaya siddhayatra subhiksa yang artinya suatu cita-cita negara yang adil dan makmur.

* 1. **Zaman Kerajaan-kerajaan Sebelum Majapahit[[7]](#footnote-7)**

Sebelum kerajaan Majapahit berdiri sebagai suatu kerajaan yang memancangkan nilai-nilai nasionalisme, telah muncul kerajaan di Jawa Tengah dan jawa timur secara silih berganti. Kerajaan Kalingga pada abad ke VII, Sanjaya abad ke VIII yang ikut membantu membangun candi Kalasan untuk Dewa Tara dan sebuah wihara untuk pendeta Budha didirikan di jawa tengah bersama dengan dinasti Syailendra abad ke VII dan IX. Refleksi puncak budaya dari Jawa Tengah dalam periode kerajan-kerajaan tersebut adalah dibangunnya candi Borobuur dan candi Prambanan.

Selain kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah tersebut di Jawa Timur munculah kerajaan-kerajaan Isana pada abad ke IX, Darmawangsa abad ke X, Airlangga abad ke XI. Agama yang diakui oleh kerajaan adalah Budha, Wisnu, dan agama syiwa yang hidup berdampingan secara damai. Raja Airlangga memiliki sikap toleransi dalam beragama dengan mengadakan hubungan dagang dan bekerjasama dengan Benggala, Chola,dan Champa serta perhatian kerjahteraan pertanian bagi rakyat dengan dengan membangun tanggul & waduk.hal ini menunjukan nilai-nila kemanusiaan.

Di wilayah Kediri jawa timur berdiri pula kerajaan Singasari yang kemudian sangat erat hubungannya dengan berdirinnya kerajaan Majapahit.[[8]](#footnote-8)

* 1. **Kerajaan Majapahit**

Pada tahun 1923 berdirilah kerajaan Majapahit di bawah pemerintahaan raja Hayam Wuruk dengan Majapatih Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala, wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya itu membentang dari semenanjung melayu sampai Irian barat melalui Kalimantan Utara. Pada buku Sutasoma karangan Empu Tantular terdapat istilah Pancasila dengan makna persatuan nasional yaitu Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua artinya walaupun berbeda namun satu jua. Sumpah palapa yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada berisi cita-cita mempersatukan seluruh nusantara raya. Kerajaan Majapahit mempunyai nilai hubungan bertetangga dengan baik dan nilai musyawarah mufakat yang dilakukan oleh sistem pemerintahannya. Perselisihan dan perang saudara pada permulaan abad XV membuat kerajaan Majapahit berangsur-angsur mulai memudar dan akhirnya mengalami keruntuhan dengan “Sinar Hilang Kertaning Bumi” pada abad XVI (1520).[[9]](#footnote-9)

* 1. **Zaman Penjajahan**

Setelah Majapahit runtuh pada abad XVI maka berkembanglah agama islam dan kerajaan islam seperti Demak dan mulailah berdatangan orang eropa yang ingin mencari rempah-rempah. Pada awalnya bangsa portugis berdagang, namun lama-kelaman mulai menunjukan peranannya dalam bidang perdagangan yang meningkat menjadi praktek penjajahan misalnya Malaka pada tahun 1511. pada akhir abad ke XVI bangsa Belanda datang ke Indonesia dengan mendirikan suatu perkumpulan dagang yang bernama VOC (Verenigde Oost Indische Compaignie). Tujuan pendirian VOC adalah:[[10]](#footnote-10)

* 1. Menghilangkan persaingan yang akan merugikan para pedagang Belanda
  2. Menyatukan tenaga untuk menghadapi saingan dari bangsa Portugis dan pedagang-pedagang lainnya di Nusantara.
  3. Mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol.

Adapun hak-hak khusus yang diberikan kepada VOC, yaitu:

1. Hak monopoli dalam perdagangan
2. Hak mengadakan perjanjian dengan raja atau penguasa setempat atas nama pemerintahan Belanda, dan
3. Hak membentuk pasukan militer, mendirikan benteng, dan mengumumkan perang.

Karena praktek VOC penuh dengan paksaan sehingga mendapatkan perlawanan dari rakyat dan kerajaan-kerajaan. Penghisapan mulai memuncak ketika belanda menerapkan system monopoli melalui tanam paksa (1830-1870) dengan memaksakan beban kewajiban terhadap rakyat.

* 1. **Kebangkitan Nasional[[11]](#footnote-11)**

Pada abad XX dipanggung politik internasional terjadilah pergolakan kebangkitan dunia timur, di Indonesia kebangkitan nasional(1908) dipelopori oleh dr.Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomo. Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1908 merupakan pelopor pergerakan nasional, setelah itu munculah Sarekat Dagang Islam(1909), kemudian diganti dengan Sarekat Islam(1911)di bawah H.O.S. Cokroaminoto, Indische Partij(1913),yang dipimpin oleh tiga serangkai yaitu: Douwes Deker, Ciptimangunkusumo, KI Hajar Dewantoro Pada tahun 1927 munculah Partai Nasional Indonesia yang dipelopori oleh Soekarno, Ciptomangunkusumo, Sartono, dan tokoh lainnya. Perjuangan kesatuan nasional kemudian diikuti dengan Sumpah Pemuda tanggal 20 Oktober 1928, yang isinya satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air Indonesia.

* 1. **Zaman Penjajahan Jepang**

Fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda “Jepang pemimpin Asia, Jepang saudara tua bangsa Indonesia”. Pemerintah Jepang bersikap bermurah hati kepada bangsa Indonesia, yaitu menjanjikan Indonesia akan merdeka. Pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang beliau memberikan hadiah kepada bangsa Indonesia yaitu kemerdekaan tanpa syarat. Untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia maka dibentuklah suatu badan yang menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu Badan Penyelidik Usaha Usaha Kemerdekaan Indonesia  (BPUPKI) atau Dokuritu Zyumbi Tioosakai yang diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat, dan beranggotakan 60 orang yang berasal dari pulau Jawa,Sumatra, Maluku, Sulawesi dan beberapa orang peranakan Eropa, Cina dan Arab.[[12]](#footnote-12)

1. **Perumusan Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia**
2. **Sidang BPUPKI Pertama**

Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu:

1. **Mr. Muh. Yamin (29 Mei 1945)**

Dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945 Muh. Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara sebagai berikut :[[13]](#footnote-13)

1. Peri kebangsaan
2. Peri kemanusian
3. Peri Ketuhanan
4. Peri kerakyatan (permusyawaratan, peerwakilan, kebijaksanaan)
5. Kesejahteraan rakyat (keadilan sosial).

Selain usulan tersebut pada akhir pidatonya Muh. Yamin menyerahkan naskah sebagai lampiran yaitu suatu rancangan usulan sementara berisi rumusan Undang Undang Dasar RI.

1. **Prof. Dr. Supomo (31 Mei 1945)**

Dalam pidatonya Prof. Dr. Supomo mengemukakan teori-teori negara sebagai berikut:

1. Teori negara prseorangan(individualis)
2. Paham negara kelas(class theory)
3. Paham negara integralistik.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan dasar filsafat negara Indonesia Soepomo mengusulkan hal-hal mengenai: kesatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat.

1. **Ir. Soekarno (1 Juni 1945)**

Dalam hal ini Ir. Soekarno menyampaikan dasar negara yang terdiri atas lima prinsip yang rumusanya yaitu: 1. Nasionalisme (kebangsaan Indonesia) 2. Internasionalisme (peri kemanusiaan) 3. kesejahteraan sosial 4. Ketuhanan yang Maha Esa. Beliau juga mengusulkan bahwa pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Sukarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut

*“Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa - namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi”.*

1. **Sidang BPUPKI Kedua (10-16 Juli 1945)**

Dalam sidang ini dibentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang dan popular disebut dengan “panitia sembilan” yang anggotanya adalah sebagai berikut:

1. Ir. Soekarno
2. Wachid Hasyim
3. Mr. Muh. Yamin
4. Mr. Maramis
5. Drs. Moh. Hatta
6. Mr. Soebarjo
7. Kyai Abdul Kahar Muzakir
8. Abikoesmo Tjokrosoejoso
9. Haji Agus Salim

Panitia sembilan ini mengadakan pertemuan secara sempurna dan mencapai suatu hasil baik yaitu suatu persetujuan antara golongan islam dengan golongan kebangsaan. Adapun naskah preambule yang disusun oleh panitia sembilan tersebut pada bagian terakhir adalah sebagai berikut :

*......maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sreta dengan mewujudkan suatu keadilan sosisal bagi seluruh rakyat Indonesia*

Setelah sidang tersebut dibentuklah panitia kecil yaitu panitia sembilan. Panitia sembilan bersidang tanggal 22 Juni 1945 dan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Mukadimah Hukum Dasar, alinea keempat dalam rumusan dasar negara sebagai berikut:[[14]](#footnote-14)

* 1. Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Persatuan Indonesia.
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanan dalam permusyawaratan/perwakilan.
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Moh. Yamin mempopulerkan kesepakatan tersebut dengan nama Piagam Jakarta.Pada sidang kedua BPUPKI tgl 10 Juli 1945 dibicarakan mengenai materi undang-undang dasar dan penjelasannya. Sidang kedua ini juga berhasil menentukan bentuk negara Indonesia yaitu Republik. Seiring berjalannya waktu, dibentuklah PPKI yang bertugas melanjutkan tugas BPUPKI.

Seiring dengan kekalahan Jepang, para pemuda mendesaak agar kemerdekaan dilaksanakan secepatnya tanpa menunggu janji Jepang, akhirnya Soekarno-Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia.

Dalam sidang BPUPKI kedua ini pemakaian istilah hukum dasar diganti dengan istilah undang-undang dasar. Keputusan penting dalam rapat ini adalah tentang bentuk negara republik dan luas wilayah negara baru. tujuan anggota badan penyelidik adalah menghendaki Indonesia raya yang sesungguhnya yang mempersatukan semua kepulauan Indonesia. Susunan Undang Undang Dasar yang diusulkan terdiri atas tiga bagian yaitu :[[15]](#footnote-15)

* 1. Pernyataan Indonesia merdeka, yang berupa dakwaan dimuka dunia atas Penjajahan Belanda
  2. Pembukaan yang didalamnya terkandung dasar negara Pancasila
  3. Pasal-pasal Undang Undang Dasar.

1. **Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945[[16]](#footnote-16)**

Setelah Jepang menyerah pada sekutu, maka kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang kemerdekaan bangsa indonesia. Untuk mempersiapkan Proklamasi tersebut maka pada tengah malam, Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda di Oranye Nassau Boulevard (sekarang Jl.imam bonjol No.1).

Setelah diperoleh kepastian maka Soekarno-Hatta mengadakan pertemuan pada larut malam dengan Mr. Achmad Soebardjo, Soekarni, Chaerul Saleh, B.M. Diah, Sayuti Melik, Dr. buntaran, Mr. Iwakusuma Sumantri dan beberapa anggota PPKI untuk merumuskan redaksi naskah Proklamasi. Pada pertemuan tersebut akhirnya konsep Soekarno lah yang diterima dan diketik oleh Sayuti Melik.

Kemudian pagi harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan timur 56 jakarta, tepat pada hari jumat legi, jam 10 pagi waktu Indonesia barat (Jam 11.30 waktu jepang), Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta membacakan naskah Proklamasi dengan khidmad dan diawali dengan pidato, sebagai berikut :

***P R O K L A M A S I***

*Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yeng mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.*

*Jakarta 17 Agustus 1945*

*Atas Nama Bangsa Indonesia*

*Soekarno-Hatta*

Sehari setelah Proklamasi keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama.

1. **Sidang Pertama (18 Agustus 1945)**

Sidang pertama PPKI dihadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut :[[17]](#footnote-17)

1. **Mengesahkan Undang-Undang dasar 1945 yang meliputi :**

Setelah melakukan beberapa perubahan pada piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

* 1. Menetapkan rancangan Hukum Dasar yang telah diterima dari badan penyilidik pada tanggal 17 juli 1945, setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai undang-undang dasar 1945
  2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama
  3. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan Musyawarah darurat.

1. **Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan**

Secara ilmiah masa Proklamasi kemerdekaan dapat mengandung pengertian sebagai berikut:

* 1. Dari sudut hukum ( secara yuridis) proklamasi merupakan saat tidak berlakunya tertib hukum kolonial.
  2. Secara politis ideologis proklamasi mengandung arti bahwa bangsa indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing melalui kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri dalam suatu negara Proklamasi Republik Indonesia.

Setelah prokamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ternyata bangsa indonesia masih menghadapi kekuatan sekutu yang berupaya menanamkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu pemaksaan untuk mengakui pemerintahan Nica (Netherland Indies Civil Administration). Selain itu belanda secara licik mempropagandakan kepada dunia luar bahwa negara Proklamasi RI. Hadiah pasis Jepang.

Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah RI mengelurkan tiga buah maklumat:

* + 1. Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya (seharusnya berlaku selama enam bulan). Kemudian maklumat tersebut memberikan kekuasaan tersebut kepada MPR dan DPR yang semula dipegan oleh Presiden kepada KNIP.
    2. Maklumat pemerintah tanggal 03 Nopember 1945, tantang pembentukan partai politik yang sebanyak–banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multi partai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai bahwa negara Proklamasi sebagai negara Demokratis.
    3. Maklumat pemerintah tanggal 14 Nopember 1945, yang intinya maklumat ini mengubah sistem kabinet Presidental menjadi kabinet parlementer berdasarkan asas demokrasi liberal.

1. **Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS)[[18]](#footnote-18)**

Sebagai hasil dari konprensi meja bundar (KBM) maka ditanda tangani suatu persetujuan (mantel resolusi) Oleh ratu belanda Yuliana dan wakil pemerintah RI di Kota Den Hag pada tanggal 27 Desember 1949, maka berlaku pulalah secara otomatis anak-anak persetujuan hasil KMB lainnya dengan konstitusi RIS, antara lain :

* 1. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat (fderalis) yaitu 16 Negara pasal (1 dan 2)
  2. Konstitusi RIS menentukan sifat pemerintah berdasarkan asas demokrasi liberal dimana mentri-mentri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah terhadap parlemen (pasal 118 ayat 2)
  3. Mukadiamh RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa dan semangat maupun isi pembukaan UUD 1945, proklamasi kemerdekaan sebagai naskah Proklamasi yang terinci

Sebelum persetujuan KMB, bangsa Indonesia telah memiliki kedaulatan, oleh karena itu persetujuan 27 Desember 1949 tersebut bukannya penyerahan kedaulatan melainkan “pemulihan kedaulatan” atau “pengakuan kedaulatan.

1. **Terbentuknya Negara Republik Indonesia tahun 1950[[19]](#footnote-19)**

Berdirinya negara RIS dalam Sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai suatu taktik secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi Proklamasi yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 taitu negara persatuan dan kesatuan sebagaimana termuat dalam alinea IV, bahwa pemerintah negara.......” yang melindungi segenap bangsa Indoneia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia .....” yang berdasarkan kepada UUD 1945 dan Pancasila. Maka terjadilah gerakan unitaristis secara spontan dan rakyat untuk membentuk negara kesatuan yaitu menggabungkan diri dengan Negara Proklamasi RI yang berpusat di Yogyakarta, walaupun pada saat itu Negara RI yang berpusat di Yogyakarta itu hanya berstatus sebagai negara bagian RIS saja. Pada suatu ketika negara bagian dalam RIS tinggalah 3 buah negara bagian saja yaitu :

1. Negara Bagian RI Proklamasi
2. Negara Indonesia Timur (NIT)
3. Negara Sumatera Timur (NST)

Akhirnya berdasarkan persetujuan RIS dengan negaraRI tanggal 19 Mei 1950, maka seluruh negara bersatu dalam negara kesatuan, dengan Konstitusi Sementara yang berlaku sejak 17 Agustus 1950.

Walaupun UUDS 1950 telah merupakan tonggak untuk menuju cita-cita Proklamasi, Pancasila dan UUD 1945, namun kenyataannya masih berorientasi kepada Pemerintah yang berasas Demokrasi Liberal sehingga isi maupun jiwanya merupakan penyimpangan terhadap Pancasila. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

* 1. Sistem multi partai dan kabinet Parlementer berakibat silih bergantinya kabinet yang rata-rata hanya berumur 6 atau 8 tahun. Hal ini berakibat tidak mempunyai Pemerintah yang menyusun program serta tidak mampu menyalurkan dinamika Masyarakat ke arah pembangunan, bahkan menimbulkan pertentangan-pertentangan, gangguan-gangguan keamanan serta penyelewengan-penyelewengan dalam masyarakat.
  2. Secara Ideologis Mukadimah Konstitusi Sementara 1950, tidak berhasil mendekati perumusan otentik Pembukaan UUD 1945, yang dikenal sebagai Declaration of Independence bangsa Indonesia. Demikian pula perumusan Pancasila dasar negara juga terjadi penyimpangan. Namun bagaimanapun juga RIS yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dari negara Republik Indonesia Serikat.

1. **Dekrit Presiden 05 Juli 1959[[20]](#footnote-20)**

Pada pemilu tahun 1955 dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat, bahkan mengakibatkan ketidakstabilan pada politik, social, ekonomi, dan hankam. Hal ini disebabkan oleh konstituante yang seharusnya membuat UUD negara RI ternyata membahas kembali dasar negara, maka presiden sebagai badan yang harus bertanggung jawab mengeluarkan dekrit atau pernyataan pada tanggal 5 Juli 1959, yang isinya :

1. Membubarkan Konstituante
2. Menetapkan kembali UUDS ’45 dan tidak berlakunya kembali UUDS’50.
3. Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

Berdasarkan Dekrit Presiden tersebut maka UUD 1945 berlaku kembali di negara Republik Indonesia hingga sat ini. Dekrit adalah suatu putusan dari orang tertinggi (kepala negara atau orang lain) yang merupakan penjelmaan kehendak yang sifatnya sepihak. Dekrit dilakukan bila negara dalam keadaan darurat, keselamatan bangsa dan negara terancam oleh bahaya. Landasan mukum dekrit adalah ‘Hukum Darurat’ yang dibedakan atas dua macam yaitu :

1. **Hukum Tatanegara Darurat Subyektif**

Hukum Tatanegara Darurat Subjektif yaitu suatu keadaan hukum yang memberi wewenang kepada orang tertinggi untuk mengambil tindakan-tindakan hukum.

* 1. **Hukum Tatanegara Darurat Objektif**

Hukum Tatanegara Darurat Objektif yaitu suatu keadaan hukum yang memberikan wewenang kepada organ tertinggi negara untuk mengambil tindakan-tindakan hukum, tetapi berlandaskan konstitusi yang berlaku.

Setelah dekrit presiden 5 Juli 1959 keadaan tatanegara Indonesia mulai stabil, keadaan ini dimanfaatkan oleh kalangan komunis dengan menanamkan ideology belum selesai. Ideology pada saat itu dirancang oleh PKI dengan ideology Manipol Usdek serta konsep Nasakom. Puncak peristiwa pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 untuk merebut kekuasaan yang sah negara RI, pemberontakan ini disertai dengan pembunuhan para Jendral yang tidak berdosa. Pemberontakan PKI tersebut berupaya untuk mengganti secara paksa ideology dan dasar filsafat negara Pancasila dengan ideology komunis Marxis. Atas dasar tersebut maka pada tanggal 1Oktober 1965 diperingati bangsa Indonesia sebagai ‘Hari Kesaktian Pancasila’

1. **Masa Orde baru[[21]](#footnote-21)**

‘Orde Baru’, yaitu suatu tatanan masyarakat dan pemerintahan yang menutut dilaksanakannya Pancasila dan UUD ’45 secara murni dan konsekuen. Munculnya orde baru diawali dengan aksi-aksi dari seluruh masyarakat antara lain : Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi guru Indonesia (KAGI), dan lainnya. Aksi tersebut menuntut dengar tiga tuntutan atau yang dikenal dengan ‘Tritura’, adapun isi tritura tersebut sebagai berikut :

1. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya
2. Pembersihan kabinet Dwikora
3. Penurunan harga barang

Karena orde lama tidak mampu menguasai pimpinan negara, maka Panglima tertinggi memberikan kekuasaan penuh kepada Panglima Angkatan Darat Letnan Jendral Soeharto dalam bentuk suatu surat yang dikenal dengan ‘surat perintah 11 Maret 1966’(Super Semar). Tugas pemegang super semar yaitu untuk memulihkan keamanan dengan jalan menindak pengacau keamanan yang dilakukan oleh PKI. Orde Baru berangsur-angsur melaksanakan programnya dalam upaya merealisasikan pembangunan nasional sebagai perwujudan pelaksanaan Pancasila dan UUD’45 secara murni dan konsekuen.[[22]](#footnote-22)

# BAB IV PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

## Definisi Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

[Pancasila](https://kumparan.com/topic/pancasila) merupakan dasar filsafat kenegaraan Indonesia sekaligus falsafah hidup bangsa. Pancasila memuat nilai kearifan lokal yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat sejak lama. Itulah sebabnya Ir. Soekarno enggan disebut sebagai “pencipta” Pancasila.

"Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan lima butir mutiara yang indah", ungkap Bung Karno dalam pidato perumusan Pancasila.

Dengan demikian, apa yang dilakukan Bung Karno beserta para pendiri bangsa bukanlah membuat Pancasila. Namun, mereka hanya memperjelas nilai-nilai hidup yang bersifat implisit untuk dituangkan menjadi sesuatu yang lebih konkret.[[23]](#footnote-23)

1. **Makna Pancasila Sebagai Sistem Filsafat**

Filsafat bisa diartikan sebagai pandangan hidup seseorang atau kelompok yang merupakan konsep dasar dari kehidupan yang dicita-citakan.[[24]](#footnote-24)

Sedangkan sistem menurut Sri Rahayu dalam Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (2017) umumnya memiliki ciri:[[25]](#footnote-25)

1. Suatu kesatuan bagian-bagian.
2. Saling berhubungan, saling ketergantungan.
3. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama.
4. Terjadi dalam suatu lingkungan yang komplek.

Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu.

Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu tentang hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dan dengan masyarakat bangsa.

Menurut Ruslan Abdul Gani, Pancasila disebut sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam oleh para founding fathers atau pendiri bangsa [Indonesia](https://kumparan.com/topic/indonesia).

## Karakteristik Sistem Filsafat Pancasila

Mengutip *Pancasila Sebagai Sistem Filsafat* oleh Rowland Bismark Fernando Pasaribu, karakteristik sistem filsafat Pancasila yaitu:[[26]](#footnote-26)

1. Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian yang disusun secara hierarkis.
2. Tiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan.
3. Di antara sila-sila Pancasila ada hubungan yang saling mengikat antara yang satu dengan yang lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat, dapat digambarkan sebagai berikut:[[27]](#footnote-27)
4. Sila 1 meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5.
5. Sila 2 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, serta mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5.
6. Sila 3 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, serta mendasari dan menjiwa; sila 4 dan 5.
7. Sila 4 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, dan 3, serta mendasari dan menjiwai sila 5.
8. Sila 5 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4.

## Mengapa Pancasila Dikatakan Sebagai Sistem Filsafat?

Melansir laman Gunadarma, Pancasila merupakan sistem filsafat karena memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Yaitu:[[28]](#footnote-28)

* 1. **Bersifat koheren**

Berhubungan satu sama lain dan tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan. Meskipun berbeda tetap saling melengkapi dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri.

* 1. **Bersifat menyeluruh**

Pancasila dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia.

* 1. **Bersifat mendasar**

Pancasila dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia untuk menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

* 1. **Bersifat spekulatif**

Pancasila sebagai dasar negara pada mulanya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan, yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui rangkaian diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI dan PPKI.[[29]](#footnote-29)

# BAB V UUD RI 1945

## Definisi UUD RI 1945[[30]](#footnote-30)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) merupakan hukum dasar negara Indonesia. Hukum dasar negara mengandung pengertian bahwa UUD NRI 1945 merupakan ketentuan dasar bagi pelaksanaan sistem pengelolaan negara. Oleh karena itu, ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Indonesia merupakan negara hukum. Ketentuan tersebut terimplementasi dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum tidak sekadar memiliki undang-undang dasar, tetapi yang terpenting adalah mampu mengimplementasikan materi undang- undang dasar dalam kehidupan sehari-hari. Rakyat dan pemerintah memiliki kewajiban moral menjalankan materi undang-undang dasar dalam berbagai aspek kehidupan antara lain pengelolaan pemerintahan dan lingkungan masyarakat. Isi muatan UUD NRI Tahun 1945 memberikan arahan kepada seluruh warga negara

Indonesia untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap pasal UUD NRI Tahun 1945 sesuai nilai-nilai Pancasila. Muatan UUD NRI Tahun 1945 yang harus diimplementasikan meliputi pelaksanaan pengelolaan pemerintahan negara yang baik, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, serta pelaksanaan sistem kedaulatan rakyat. Dalam UUD NRI Tahun 1945 juga memuat ketentuan yang mengatur tentang lembaga negara. Berikut struktur lembaga-lembaga negara dalam ketatanegaraan Indonesia pasca amendemen UUD NRI Tahun 1945.

Ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang antara lain bidang pemerintahan, kenegaraan, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat. Berikut implementasi UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, bebangsa, dan bernegara.

* 1. Bidang pemerintahan, misalnya mengadakan rapat membahas masalah-masalah kenegaraan dengan cara musyawarah mufakat.
  2. Bidang penegakan hak asasi manusia, misalnya pemerintah memberikan hak kebebasan berserikat dan berkumpul untuk warga negara.

## Arti Penting UUD 1945 Bagi Bangsa[[31]](#footnote-31)

Kendati UUD 1945 merupakan hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia, namun tidak dapat mengatur seluruh kehidupan di dalam masyarakat. Pasalnya, di dalam Undang-undang dasar tidak hanya terdapat hukum tertulis, tetapi ada juga hukum atau aturan yang tidak tertulis. Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII SMP (2017) terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), UUD 1945 hanya mengatur hukum hukum tertulis. Sementara itu, yang berlaku di negara ada juga aturan yang tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis adalah aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Meskipun tidak tertulis, aturan tersebut tetap berlaku dan harus dipatuhi atau yang biasa disebut sebagai konvensi.

Salah satu contoh konvensi yang ada di Indonesia adalah pidato presiden pada setiap tanggal 16 Agustus di Sidang Paripurna DPR sebelum memperingati Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Tidak ada hukum tertulis atau undang-undang yang menyatakan bahwa presiden harus berpidato di Sidang Paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus. Namun, hal itu telah dilakukan sejak era Presiden Sukarno hingga sekarang pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Selain sebagai rujukan hukum perundang-undangan di Indonesia, UUD 1945 juga memiliki arti penting bagi kehidupan berbangsa dalam masyarakat. Apabila masyarakat dapat menaati hukum tertulis yang ada, maka akan terbentuk kehidupan yang aman dan tertib. Merujuk Modul PJJ Gasal PPKn Kelas VII (2020) terbitan Kemdikbud, UUD 1945 mencegah terjadinya benturan antara kepentingan atau masalah dalam kehidupan bernegara. Undang-undang Dasar memberi jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, kesejahteraan dan, kemakmuran di masyarakat. Hal itu berupa perlindungan terhadap segenap warga negara, supremasi keadilan berjalan, menjaga norma-norma di dalam masyarakat tetap terpelihara, jalannya pemerintahan menjadi terkendali. Dengan UUD 1945, masyarakat Indonesia dapat bersatu dan hidup dalam kerukunan. Selain itu, di dalam UUD 1945 dapat menjadi sumber motivasi, aspirasi, cita-cita hukum dan moral yang ingin ditetapkan bangsa Indonesia, serta nilai-nilai universal dan lestari dalam peradaban bangsa-bangsa di dunia.

# BAB VI AMANDEMEN UUD RI 1945



## Definisi Amandemen UUD RI 1945

Amandemen adalah perubahan resmi dokumen atau catatan tertentu, tanpa melakukan perubahan terhadap UUD. Dapat dikatakan, amandemen UUD 1945 dilakukan untuk melengkapi dan memperbaiki beberapa hal terperinci dari UUD yang asli.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan amandemen sebagai usul perubahan Undang-Undang yang dibicarakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sebagainya, atau penambahan pada bagian yang sudah ada.

Melalui 2 pengertian di atas, dapat dikatakan jika [Amandemen UUD](https://www.harianhaluan.com/tag/Amandemen-UUD) 1945 berkaitan dengan perubahan isi dari dokumen Undang-Undang. Tentu saja yang dilakukan dengan alasan tertentu. Misalnya untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat.[[32]](#footnote-32)



## Mekanisme Atau Tata Cara Melakukan Amandmen UUD 1945[[33]](#footnote-33)

Melakukan amandemen UUD 1945 bukan perkara mudah. Sebab, hal tersebut berkaitan dengan perubahan konstitusi dalam tubuh pemerintahan. Diperlukan kajian dan analisis mendalam, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara, sebelum memutuskan untuk melakukan amandemen UUD 1945.

Regulasi mengenai amandemen UUD 1945 telah diatur dalam UUD 1945, melalui Bab XVI mengenai Perubahan Undang-Undang Dasar pada pasal 37. Ahl hukum tata negara, Bivitri Susanti mengatakan, setiap konstitusi di dunia memang memungkinkan adanya amandemen:

* 1. Mekanisme atau tata cara melakukan amandemen UUD 1945 yang pertama adalah dengan usulan agenda amandemen UUD 1945 dari anggota MPR.  Usul amandemen UUD 1945 dapat diagendakan dalam sidang MRP. Dengan catatan, harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah total anggota MPR.
  2. Jika amandemen UUD 1945 tersebut ingin diproses, agenda amandemen UUD 1945 harus disetujui oleh 2/3 dari jumlah total anggota DPR. Kemudian, Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD 1945 diajukan secara tertulis, dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
  3. Setelah agenda amandemen UUD 1945 disetujui, pembahasan bisa di mulai. Namun untuk memulai agenda tersebut, harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah total anggota MPR.
  4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD 1945 dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya, lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.

Dapat dilihat, proses yang harus ditempuh dalam amandemen UUD 1945 cukup panjang. Sehingga, amandemen UUD 1945 bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Perlu ada kondisi mendesak yang memaksa MPR mengusulkan amandemen UUD 1945.

Selain itu, wacana amandemen UUD 1945 tidak jarang menimbulkan perdebatan publik. Pemerintah bertugas untuk mengendalikan perdebatan publik tesebut, untuk mencegah terjadinya perpecahan.

Maka, amandemen UUD 1945 bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Selain aspek konstitusional, aspek sosial dan kultural juga tak kalah penting untuk dipertimbangkan. Agar amandemen UUD 1945 benar-benar membawa perubahan yang baik bagi negara dan warga negara.

## Tujuan Amandemen UUD 1945

Tujuan Amandemen UUD 1945 antara lain sebagai berikut:[[34]](#footnote-34)

1. Untuk menyempurnakan beberapa aturan dasar, dalam tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan hukum.
2. Sebagai wujud respon pada tuntutan reformasi
3. Amandemen 1945 dilakukan dengan tujuan mempertegas filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis negara.

## Risiko Amandemen UUD 1945

Amandemen UUD 1945 bukannya tanpa risiko. Ada sejumlah risiko yang dapat terjadi karena ada amandemen UUD 1945. Risiko itu antara lain:[[35]](#footnote-35)

1. Terdeteksinya sejumlah kelemahan sistimatika dan substansi UUD pasca perubahan seperti inkonsisten
2. Adanya sejumlah kerancuan sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas.
3. Amandemen UUD 1945 tidak dengan mudah memancing pertumbuhan budaya taat pada konstitusi

## Kondisi UUD 1945 Sebelum Diamandemen[[36]](#footnote-36)

UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen memiliki 38 bab, 37 pasal, dan 64 ayat. UUD 1945 mengalami empat kali amandemen. Hasilnya, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal 194 ayat, tiga pasa aturan perakitan, dan dua pasal aturan tambahan. Berikut adalah rincian singkat setiap amandemen.

* 1. **Amandeman UUD 1945 ke 1[[37]](#footnote-37)**

Amandemen pertama dilakukan pada Sidang Umum MPR pada 14-21 Oktober 1999. Hasilnya, ada sembilan pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21 yang diamandemen.

Perubahan fundamental yang terjadi pada Amandemen UUD 1945 KE 1 antara lain:

1. Pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR
2. Pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
   1. **Amandeman UUD 1945 Ke 2[[38]](#footnote-38)**

Amandemen kedua terjadi pada Sidang Tahunan MPR pada 7 hingga 18 Agustus 2010. Ada 15 pasal yang mengalami perubahan atau tambahan/tambahan. Selain itu ada 6 bab yang mengalami perubahan penting di beberapa bidang, antara lain:

1. Otonomi daerah/desentralisasi.
2. Penegasan fungsi dan hak DPR.
3. Perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia
4. Sistem pertahanan dan keamanan Negara
5. Pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri
6. Pengaturan bendera, bahasa, lambang Negara, dan lagu kebangsaan
   1. **Amandemen UUD 1945 Ke 3[[39]](#footnote-39)**

Amandeman uud 1945 ketiga berlangsung pada Sidang Umum MPR, 1 hingga 9 September 2001. Ada 23 pasal perubahan/tambahan dan tiga bab tambahan. Perubahan mendasar yang dimaksud antara lain:

1. Penegasan Indonesia sebagai negara demokratis
2. Perubahan struktur dan kewenangan MPR
3. Pemilihan Presiden dan wakil Presiden langsung oleh rakyat
4. Mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden
5. Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah
6. Sistem Pemilihan umum
7. Pembaharuan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan
8. Perubahan kewenangan dan proses pemilihan dan penetapan hakim agung
9. Pembentukan Mahkamah Konstitusi
10. Pembentukan Komisi Yudisial
    1. **Amandemen UUD 1945 Ke 4[[40]](#footnote-40)**

Amandemen UUD 1945 keempat berlangsung pada Sidang Umum MPR, 1 hingga 9 Agustus 20012. Ada 13 pasal, tiga pasal aturan peralihan, dua pasal tambahan dan peruban dua bab. Tidak ada catatan khusus selain fakta pembahasannya berlangsung alot pada Sidang MPR.

# BAB VII TRIAS POLITIKA DALAM NEGARA RI

## Definisi Trias Politika Dalam Negara RI

Penerapan trias politica dalam pemerintahan membuat kekuasaan penyelenggara negara tidak absolut karena terpilah menjadi beberapa lembaga yang saling mengawasi. Konsep trias politika dicetuskan oleh Montesquieu. Teori pemisahan kekuasaan ini menyebutkan, kekuasaan negara mesti dipisahkan menjadi beberapa bagian. Dengan pemisahan orang dan fungsinya, menjadikan kekuasaan tidak mutlak dan memungkinkan di antara bagian saling bekerja sama. Kekuasaan yang diberikan absolut pada seseorang atau lembaga, berpotensi terjadi penyalahgunaan dalam praktiknya.

Lord Acton pernah mengatakan, “Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti menyalahgunakannya”. Hal ini bisa dicegah dengan membagi kekuasaan. Trias politika sering ditemukan pada negara yang menganut demokrasi. Namun pada perjalanannya, teori ini mengalami pengembangan dalam praktiknya. Pembagian kekuasaan tidak terbatas pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.[[41]](#footnote-41)



## Trias Politika Di Indonesia Sebelum Amandemen[[42]](#footnote-42)

Indonesia salah satu negara yang menerapkan trias politika tidak murni. Baik sebelum atau sesudah amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, jumlah lembaga penyelenggara negara tidak terbatas pada MPR, DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung (MA). Masih ada lembaga lain yang turut berperan. Sebelum amandemen, lembaga negara terdiri dari MPR, DPR, Presiden, MA, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). DPA memegang kekuasan konsultatif dan BPK mengampu kekuasan eksaminatif.

1. MPR dan DPR selaku legislatif memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang.
2. Presiden sebagai eksekutif memegang kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
3. Mahkamah Agung bertugas dalam mempertahankan undang-undang dan sekaligus berkuasa untuk mengadili apabila terjadi pelangaran terhadap undang-undang.
4. Kekuasaan konsultatif yang dipegang DPA, memberikan kewenangan untuk memberi nasihat dan pertimbangan kepada eksekutif.
5. BPK menjadi pemangku kekuasaan eksaminatif yang bertugas melakukan pengawasan terhadap keuangan negara.

## Trias Politika Di Indonesia Setelah Amandemen[[43]](#footnote-43)

Ada perubahan pemegang kekuasan di Indonesia setelah dilakukan amandemen UUD 1945. Jumlah lembaga negara ditambah sehingga proses pelaksanaan kekuasan dan pengawasannya lebih kuat.

Ada 8 lembaga negara dalam sistem pemerintahan yaitu MPR, DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, MA, BPK, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

* 1. Pemegang fungsi legislatif adalah MPR, DPR, dan DPD. Anggota DPD dipilih dalam pemilu dan merupakan perwakilan dari setiap provinsi di Indonesia. DPD berhak ikut duduk dalam pembahasan dan penetapan undang-undang.
  2. Pengampu fungsi eksekutif tetap berada di tangan Presiden. Jika sebelum amandemen Presiden dipilih oleh anggota MPR lewat suara terbanyak, maka setelah amandemen Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden dapat mengangkat menteri-menteri untuk membantu kerja Presiden dalam kabinet.
  3. Fungsi yudikatif ditangani oleh MA, MK, dan KY. Komisi Yudisial memiliki peranan dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung sekaligus menjaga marwah kehakiman, termasuk perilaku para hakim. Sementara Mahkamah Konstitusi bertugas melakukan uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang sebelumnya tugas ini ditangani MPR.
  4. Fungsi eksaminatif berada di tangan BPK. Lembaga ini akan selalu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara.

Trias politika menjadi sebuah langkah baik menjalankan sistem pemerintahan yang efektif. Ketiadaan kekuasaan absolut dapat mencegah penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara dan rakyatnya. Meski demikian, rakyat juga perlu mengawasi jalannya lembaga-lembaga negara saat ditemukan indikasi saling bekerja sama dalam menetapkan kebijakan yang merugikan.

# BAB VIII KELEMBAGAAN NEGARA MENURUT UUD RI 1945

## Definisi Kelembagaan Negara Menurut UUD RI 1945

Tiap negara menggunakan sistem pemerintahan yang berbeda-beda, seperti misalnya Indonesia yang menggunakan [sistem pemerintahan presidensial](https://kids.grid.id/read/472887576/mengetahui-mengenai-kelebihan-dan-kekurangan-sistem-presidensial) dengan bentuk pemerintahan republik. [Lembaga negara](https://kids.grid.id/read/472627230/pengertian-lembaga-negara-yudikatif-contoh-beserta-tugasnya) di Indonesia dibagi berdasarkan fungsi dan mengalami beberapa perubahan berdasarkan aspirasi rakyat. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan keseimbangan yang bisa mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam [sistem pemerintahan Indonesia](https://kids.grid.id/read/472316734/apa-tugas-wewenang-lembaga-eksekutif-belajar-dari-rumah-1-september-2020).

Pembentukan lembaga negara berdasarkan bermacam-macam dasar hukum seperti [UUD 1945](https://kids.grid.id/read/472835806/pembagian-kekuasaan-di-indonesia-secara-horizontal-dalam-uud-1945), [UU](https://kids.grid.id/read/472845759/hak-asasi-manusia-yang-terkandung-dan-tertulis-dalam-undang-undang), Peraturan Pemerintah, Peraturan [Presiden](https://kids.grid.id/read/472824812/nama-nama-presiden-indonesia-dan-wakilnya-serta-nama-kabinetnya), dan Peraturan Menteri.[[44]](#footnote-44)

1. **Pengertian Lembaga Negara**

Lembaga Negara adalah lembaga pemerintahan yang disebut juga dengan Civilizated Organization. Lembaga negara di Indonesia adalah institusi yang dibentuk berdasar UUD 1945 dan UU dan memiliki sistem khusus yang dirancang untuk pembangunan negara. Lembaga negara bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan yang berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Fungsi dari lembaga negara adalah bekerja untuk mewujudkan tujuan pembangunan NKRI yaitu menjadi negara yang maju dan mencapai kesejahteraan masyarakat melalui perwujudan fasilitas dan kebijakan yang pro rakyat. Keberadaan lembaga negara salah satunya bermaksud untuk menciptakan suasana kondusif dan sistematis dalam penyelenggaraan negara.[[45]](#footnote-45)

1. **Jenis-Jenis Lembaga Negara[[46]](#footnote-46)**

Lembaga Negara di Indonesia dibagi berdasarkan fungsi dan tugasnya, antara lain:

1. Lembaga Negara Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden)
2. Lembaga Negara Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR))
3. Lembaga Negara Yudikatif (Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi(MK), Komisi Yudisial (KY))
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

# BAB IX PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL

## Definisi Pancasila Sebagai Ideologi Nasional

Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama.[[47]](#footnote-47)

Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Selain itu, pancasila sebagai ideologi negara juga bermakna menjadikan pancasila sebagai cita-cita atau visi. Hal ini tentunya berlaku untuk pemerintah dan seluruh warga negara.[[48]](#footnote-48) Pengertian ini juga ada di dalam Ketetapan MPR No.XVIII Tahun 1998 Pasal 1, yang bunyinya:

Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

## Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi Nasional

Sebagai ideologi negara, tentu saja pancasila juga memiliki fungsi. Berikut ini adalah fungsi pancasila sebagai ideologi negara, antara lain:[[49]](#footnote-49)

* 1. Fungsi pertama adalah, pancasila berperan sebagai sarana pemersatu masyarakat dan juga bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
  2. Kedua, berfungsi untuk mengarahkan dan motivasi bangsa untuk mencapai cita-citanya.
  3. Ketiga, karena pancasila merupakan identitas bangsa, ia juga berperan untuk memelihara dan mengembangkan identitas tersebut.
  4. Keempat, pancasila sebagai ideologi negara juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Maksudnya adalah, pancasila menjadi tolak ukur sejauh mana negara kita telah menggapai cita-citanya.

## Proses Terbentuknya Pancasila Sebagai Ideologi Nasional[[50]](#footnote-50)

[Hari lahirnya Pancasila](https://kumparan.com/topic/hari-lahir-pancasila/) diperingati oleh bangsa Indonesia setiap tanggal 1 Juni. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang berisi ideologi-ideologi negara.

Proses pembuatan Pancasila sendiri merupakan salah satu sejarah paling penting di Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua suku kata, yakni panca yang artinya lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Jika digabungkan, arti dari Pancasila adalah lima prinsip.

Terdapat lima sendi utama yang menyusun Pancasila. Kelima sendi tersebut adalah poin-poin dalam Pancasila sendiri, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Isi dari Pancasila tercantum dalam Preambule (Pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kandungan dan urutan Pancasila sempat mengalami perubahan sebelum disahkan pada 1 Juni 1945.

**Sejarah Perumusan hingga Lahirnya** [Pancasila](https://kumparan.com/topic/pancasila/)

Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, memberikan janji kemerdekaan untuk Indonesia pada 7 September 1944. Pemerintah Jepang setelah itu membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 1 Maret 1945 untuk mempelajari hal-hal mengenai tata pemerintahan Indonesia Merdeka.

Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Widyodiningrat dipilih menjadi ketua BPUPKI. Kala itu dalam pidato pembukaannya, ia mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang yang dihadiri oleh 74 orang. Anggota sidang terdiri dari 67 orang Indonesia dan 7 orang Jepang.

Dr. Radjiman bertanya “Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini?”

Sejumlah usulan akhirnya disampaikan oleh para anggota. Salah satunya dari Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, ia mengajukan rumusan lima dasar yaitu Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat.

Menurutnya, kelima sila tersebut berakar pada sejarah, agama, peradaban, dan ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia.

Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno secara spontan menyebut dasar-dasar negara dalam pidatonya yang kini dikenal dengan judul “Lahirnya Pancasila”. Dasar-dasar tersebut adalah Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan.

Dalam pidatonya, Soekarno mengucapkan nama Pancasila. Soekarno juga mengatakan bahwa nama Pancasila ini ditentukan dengan petunjuk seorang teman ahli bahasa.

Usulan Soekarno ini rupanya diterima dengan baik oleh seluruh peserta sidang. Ini menjadikan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila.

Kemudian sebelum sidang pertama berakhir, mereka membentuk suatu panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila usulan Soekarno dan juga menetapkan dokumen perumusan sebagai teks untuk proklamasi Indonesia merdeka. Panitia ini akhirnya dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan.

Rumusan Pancasila akhirnya disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 dan diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.

**Protes dari Para Utusan**

Usai upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, beberapa utusan datang dari Indonesia bagian Timur. Mereka menyampaikan keberatan terkait bunyi sila pertama Pancasila.

Para utusan tersebut diantaranya adalah Sam Ratulangi dari Sulawesi, Tadjoedin Noor dan Ir. Pangeran Noor dari Kalimantan, I Ketut Pudja dari Nusa tenggara, dan Lau Harhary dari Maluku. Sebelumnya, bunyi sila pertma Pancasila adalah “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Bunyi sila pertama [Pancasila](https://kumparan.com/topic/pancasila/) tersebut dianggap tidak sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia yang tidak hanya memeluk agama Islam. Pengubahan bunyi sila pertama tersebut dikonsultasikan kepada tokoh islam, yakni Kasman Singodimejo, Wahid Hasyim, Teuku M. Hasan, dan Ki Bagus Hadikusumo.

Akhirnya disepakati bunyi sila pertama Pancasila menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Setelah itu Pancasila sudah bersifat final dan diterima oleh seluruh kalangan masyarakat.

# BAB X IDEOLOGI LAIN YANG BERKEMBANG DI DUNIA

## Pengertian Ideologi

Ideologi adalah seperangkat keyakinan atau filosofi yang dikaitkan dengan seseorang atau sekelompok orang, terutama karena alasan yang tidak murni epistemik, di mana elemen praktis sama menonjolnya dengan elemen teoretis. Istilah ideologi berasal dari bahasa Prancis idéologie, yang berasal dari gabungan bahasa Yunani: idéā yang berarti ‘gagasan, pola’ dan -logíā yang berarti ‘studi tentang, ilmu yang mempelajari’. Istilah ini diciptakan oleh Antoine Destutt de Tracy, seorang aristokrat dan filsuf Pencerahan Perancis.

Pada tahun 1796 Tracy memahami bahwa istilah ideologi merupakan  “ilmu gagasan” untuk mengembangkan sistem gagasan yang rasional. Dia memahami ideologi sebagai filosofi liberal yang akan membela kebebasan individu, properti, pasar bebas, dan batasan konstitusional pada kekuasaan negara. Dia berpendapat bahwa, di antara aspek-aspek ini, ideologi adalah istilah yang paling umum karena ‘ilmu gagasan’ juga berisi studi tentang ekspresi dan deduksi mereka. Kudeta yang menggulingkan Maximilien Robespierre membuat Tracy melanjutkan pekerjaannya.

Tracy bereaksi pada fase terorisme revolusi selama rezim Napoleon. Ia mencoba menyusun sistem gagasan rasional untuk melawan orang-orang irasional yang hampir menghancurkannya.[[51]](#footnote-51)

## Pendapat Ahli Tentang Pengertian Ideologi[[52]](#footnote-52)

* 1. Terry Eagleton: Menurut Eagleton, ideologi adalah sebuah sistem konsep dan pandangan yang memiliki fungsi memahami dunia dan juga mengaburkan kepentingan sosial yang ada di dalamnya.
  2. Eagleton berpendapat bahwa Ideologi disertai dengan konsistensi internal yang cenderung membentuk sistem tertutup untuk mempertahankan dirinya sendiri ketika menghadapi kontradiksi.
  3. Malcolm Hamilton: Hamilton menyatakan bahwa ideologi merupakan sistem ide-ide yang normatif, faktual dan secara kolektif memiliki sikap yang mendukung dan membenarkan pola tertentu dari pengaturan, perilaku politik dan ekonomi.
  4. Michael Hunt:Ideologi adalah rangkaian keyakinan atau asumsi yang berkaitan dalam mengurangi kompleksitas dalam realitas tertentu sehingga menjadi sebuah istilah yang bisa dipahami dan menyarankan cara yang benar untuk menangani kenyataan tersebut.
  5. Karl Marx:Menurut Karl Marx, ideologi adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama masyarakat. Menurutnya, ideologi muncul dari corak masyarakat tersebut.

## Sejarah Ideologi[[53]](#footnote-53)

Istilah ideologi muncul pertama kali dalam bahasa Prancis sebagai idéologie pada saat Revolusi Prancis, yang diperkenalkan oleh seorang filsuf, A.-L.-C. Destutt de Tracy, sebagai istilah pendek untuk apa yang disebutnya “ilmu tentang gagasan”, yang ia klaim telah diadaptasi dari epistemologi filsuf John Locke dan Etienne Bonnot de Condillac, yang baginya semua pengetahuan manusia adalah pengetahuan tentang gagasan.

Faktanya adalah, bagaimanapun, bahwa ia lebih berutang kepada filsuf Inggris Francis Bacon, yang ia hormati. Bacon-lah yang telah menyatakan bahwa tujuan sains tidak hanya untuk memperluas pengetahuan manusia, tetapi juga untuk memperbaiki kehidupan manusia di bumi, dan penyatuan program dengan intelektual inilah yang membedakan ideologi Destutt de Tracy dari teori, sistem, atau filosofi yang pada dasarnya.

Ilmu gagasan adalah ilmu dengan misi yang bertujuan untuk melayani orang, bahkan menyelamatkan mereka, dengan membersihkan pikiran mereka dari prasangka dan mempersiapkan mereka untuk kedaulatan akal dan integritas.

Destutt de Tracy dan rekan ideolognya merancang sistem pendidikan nasional yang mereka yakini akan mengubah Prancis menjadi masyarakat yang rasional dan ilmiah. Ajaran mereka menggabungkan keyakinan kuat pada kebebasan individu dengan program perencanaan negara yang rumit, dan untuk waktu yang singkat menjadi doktrin resmi Republik Perancis.

Napoleon pada awalnya mendukung Destutt de Tracy dan teman-temannya, tetapi dia segera berbalik melawan mereka. Pada bulan Desember 1812 dia bahkan melangkah lebih jauh dengan menghubungkan kesalahan atas kekalahan militer Prancis dengan pengaruh para ideolog.

Napoleon menghubungkan nama idéologie dengan apa yang dianggap sebagai elemen paling menjijikkan dalam pemikiran Revolusioner, dia menginvestasikan kata yang sama dengan semua perlawananan dan tidak percayanya.

Ideologi, sejak saat itu, memainkan peran ganda dari sebuah istilah yang baik dan buruk tidak hanya dalam bahasa Prancis tetapi juga dalam bahasa Jerman, Inggris, Italia, dan semua bahasa lain di dunia yang diterjemahkan atau ditransliterasikan. Beberapa sejarawan filsafat menyebut abad ke-19 sebagai zaman ideologi, bukan karena kata itu sendiri pada waktu itu begitu banyak digunakan, tetapi karena begitu banyak pemikiran pada masa itu.

Bahkan bisa dibedakan dari pemikiran yang berlaku pada abad-abad sebelumnya dengan ciri-ciri yang berbeda yang disebut ideologis. Subyek ideologi adalah salah satu yang kontroversial, dan dapat diperdebatkan bahwa setidaknya sebagian dari kontroversi ini berasal dari ketidaksepakatan mengenai definisi kata ideologi.

Meskipun kata ideologi dalam pengertian yang berasal dari pemahaman Destutt de Tracy telah digunakan secara modern, penting untuk memperhatikan pengertian khusus bahwa ideologi diberikan dalam filsafat Hegelian dan Marxis, di mana ia digunakan dengan cara yang merendahkan.

Ideologi di sana menjadi kata untuk apa yang oleh para filsuf ini juga disebut kesadaran yang palsu. G.W.F. Hegel berpendapat bahwa orang atau masyarakat adalah instrumen sejarah, mereka memainkan peran yang diberikan kepada mereka. Marx tidak konsisten dalam penggunaan kata ideologi, karena dia tidak selalu menggunakan istilah itu untuk merendahkan, dan beberapa referensinya dengan jelas menyiratkan kemungkinan sebuah ideologi menjadi benar.

Kaum Marxis abad kedua puluh, yang sering kali membuang pengertian ideologi yang merendahkan, berbicara tentang Marxisme sebagai ideologi itu sendiri. Di negara-negara komunis tertentu, banyak lembaga ideologis didirikan, dan para filosof partai biasanya disebut sebagai ideologi partai. Marxisme adalah contoh yang sangat baik, sebuah paradigma, dari sebuah ideologi.

## Fungsi Ideologi

Peran ideologi dalam hubungan internasional dapat dianalisis dalam dua bagian yaitu,  peran ideologi umum sebagai unsur perilaku negara dan peran ideologi tertentu dalam pembuatan dan implementasi kebijakan luar negeri, yaitu:[[54]](#footnote-54)

* 1. **Peran ideologi umum**

Di zaman sekarang ini, ideologi liberalisme dan komunisme telah menjadi dua ideologi umum utama yang memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku negara dalam hubungan internasional.

Sejak abad 17, ideologi liberalisme telah menjadi batu pondasi sistem sosial, ekonomi dan politik barat. Pada abad ke-20 kemudian berkembang menjadi doktrin Demokrasi Liberal, Kapitalisme Demokratik dan bahkan Liberalisme Modern.

Ideologi Komunisme adalah kebalikan dari Liberalisme. Berdasarkan filosofi Marxisme-Leninisme, ia menganggap kesetaraan lebih penting daripada kebebasan. Ia mengutamakan faktor-faktor ekonomi dari hubungan sosial dan menganggapnya sebagai penentu semua perilaku baik dalam segi sosial, politik, budaya, dan lain-lain.

Ideologi-ideologi umum banyak digunakan untuk menutup-nutupi tujuan-tujuan kekuasaan suatu bangsa. Hal ini terbukti dari fakta bahwa meskipun menjadi juara terkuat liberalisme, Amerika Serikat tidak ragu-ragu untuk memiliki hubungan baik dengan beberapa rezim totaliter dan otoriter dan kediktatoran militer, seperti negara Pakistan, untuk merugikan kepentingan demokrasi terbesar di dunia yaitu India.

Amerika Serikat  terus mengikuti kebijakan dalam membina hubungan dengan Komunis China dan pada saat yang sama terus mengikuti kebijakan mendukung Liberalisme dan Hak Asasi Manusia. Demikian juga, tidak ada negara yang sekarang siap membiarkan perbedaan ideologis menghalangi hubungan dengan negara lain.

Dengan demikian ideologi-ideologi umum merupakan faktor-faktor hubungan internasional di zaman kita, tetapi bukan merupakan penentu perilaku negara-negara di lingkungan internasional. Ini mempengaruhi jalannya hubungan antar bangsa hanya dalam cara yang terbatas.

* 1. **Peran ideologi tertentu**

Zaman kontemporer jelas mencerminkan peran yang dimainkan oleh beberapa ideologi tertentu dalam politik internasional seperti Ideologi Status Quo, Ideologi Imperialisme, dan Ideologi Ambigu. Bangsa-bangsa yang berusaha mempertahankan posisi kekuasaan yang ada mengejar kebijakan status quo.

Prinsip ini memiliki pandangan “apa yang ada harus memiliki sesuatu yang menguntungkannya, jika tidak maka tidak akan ada.” Kebijakan ini berlaku di negara Swiss, Denmark, Norwegia dan Swedia. Kebijakan yang berusaha mengubah status quo atau distribusi kekuasaan tertentu dianggap sebagai ideologi imperialis. Kebijakan imperialisme selalu membutuhkan pembenaran untuk mengubah pengaturan teritorial yang ada.

Untuk mengamankan tujuan yang diinginkan, banyak negara menggunakan ideologi tertentu yang cukup kabur dan ambigu. Ideologi ambigu ini secara populer disebut ideologi anti-imperialisme, semua ini bertujuan untuk mencela tindakan lawan mereka sebagai ‘tindakan imperialis’.

Bahkan di era ini, ideologi-ideologi tertentu terus mengabdi kepada para pembuat keputusan di setiap negara di dunia, dasar untuk perumusan, pembenaran dan pengamanan tujuan kepentingan nasional mereka. Ideologi dalam hubungan internasional merupakan faktor kekuatan nasional dan kebijakan luar negeri. Namun, sekarang ‘kepentingan’ telah muncul sebagai faktor hubungan internasional yang lebih tangguh daripada ideologi. Nyatanya, peran ideologi semakin tergerus.

## Jenis-Jenis Ideologi

Berikut macam-macam ideologi yang ada di dunia:[[55]](#footnote-55)

* 1. **Kapitalisme**

Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan operasinya untuk keuntungan. Ciri-ciri utama kapitalisme meliputi akumulasi modal, pasar kompetitif, sistem harga, kepemilikan pribadi dan pengakuan hak milik, pertukaran sukarela dan kerja upahan.

Dalam ekonomi pasar kapitalis, pengambilan keputusan dan investasi ditentukan oleh pemilik kekayaan. Sedangkan harga dan distribusi barang dan jasa ditentukan oleh ekonomi pasar dalam persaingan barang dan jasa.

Ekonomi pasar telah ada di bawah berbagai bentuk pemerintahan, waktu, tempat, dan budaya yang berbeda. Masyarakat kapitalis modern berkembang di Eropa Barat dalam proses yang mengarah pada Revolusi Industri.

Sistem kapitalis sejak itu menjadi dominan di dunia Barat. ideologi kapitalisme ini menyebar dengan cepat. Pertumbuhan ekonomi adalah kecenderungan karakteristik dari ekonomi kapitalis.

* 1. **Liberalisme**

Liberalisme adalah filosofi politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan dari yang diperintah dan persamaan di depan hukum. Liberal mendukung beragam pandangan tergantung pada pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip ini, tetapi mereka umumnya mendukung hak-hak individu termasuk hak-hak sipil dan hak asasi manusia, demokrasi, sekularisme, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama dan ekonomi pasar.

Liberalisme menjadi gerakan yang berbeda di Zaman Pencerahan, ketika menjadi populer di kalangan filsuf dan ekonom Barat. Liberalisme berusaha menggantikan norma-norma atau hak istimewa turun-temurun, agama negara, monarki absolut, hak ilahi raja dan konservatisme tradisional dengan demokrasi perwakilan dan supremasi hukum. Liberalisme juga menjadi alat untuk mengakhiri kebijakan merkantilis, monopoli kerajaan dan hambatan perdagangan lainnya.

* 1. **Komunisme**

Komunisme adalah ideologi dan gerakan filosofis, sosial, politik, dan ekonomi yang tujuannya adalah pembentukan masyarakat komunis, yaitu tatanan sosial ekonomi yang terstruktur di atas gagasan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Komunisme adalah bentuk sosialisme yang spesifik, namun berbeda.

Ideologi komunis modern mulai berkembang selama Revolusi Prancis. “Manifesto Komunis” karya Karl Marx dan Friedrich Engels, diterbitkan pada tahun 1848. Pamflet itu menolak prinsip Kristen dari filosofi komunis sebelumnya.

Manifesto Komunis menyajikan Revolusi Perancis sebagai titik balik sejarah utama ketika orang-orang borjuis menjungkirbalikkan struktur kekuasaan feodal dan mengantarkan era kapitalis modern.

* 1. **Sosialisme**

Sosialisme adalah sistem ekonomi dan politik kerakyatan yang didasarkan pada kepemilikan publik. Sosialisme juga dikenal sebagai kepemilikan kolektif atau bersama atas alat-alat produksi.Sarana tersebut meliputi mesin, peralatan, dan pabrik yang digunakan untuk memproduksi barang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara langsung.

Komunisme dan sosialisme adalah istilah umum yang mengacu pada dua aliran pemikiran ekonomi sayap kiri. Kedua ideologi ini menentang kapitalisme.Dalam sistem sosialis murni, semua keputusan produksi dan distribusi yang sah dibuat oleh pemerintah, dan individu bergantung pada negara untuk segala hal mulai dari makanan hingga perawatan kesehatan. Pemerintah menentukan tingkat output dan harga barang dan jasa tersebut.

* 1. **Nasionalisme**

Nasionalisme adalah ideologi di mana orang-orang yang percaya bahwa bangsa mereka lebih unggul dari yang lain. Rasa superioritas ini sering berakar pada etnisitas bersama. Dalam situasi lain, nasionalisme dibangun di sekitar bahasa, agama, budaya, atau seperangkat nilai sosial yang sama. Bangsa menekankan simbol bersama, cerita rakyat, dan mitologi. Berbagi musik, sastra, dan olahraga dapat semakin memperkuat nasionalisme.

Kaum nasionalis menuntut untuk merdeka dari negara lain. Mereka tidak bergabung dengan organisasi global atau berkolaborasi dengan negara lain dalam upaya bersama. Jika rakyat adalah bagian dari bangsa lain, maka mereka akan menginginkan kebebasan dan negara mereka sendiri, karena mereka percaya pada keunggulan mereka sendiri.

* 1. **Fasisme**

Fasisme umumnya dikaitkan dengan rezim Italia dan Jerman yang berkuasa setelah Perang Dunia I, meskipun negara-negara lain juga telah diperintah oleh rezim fasis. Adolf Hitler di Jerman, Benito Mussolini di Italia, Francisco Franco di Spanyol dan Juan Perón di Argentina adalah pemimpin fasis paling terkenal di abad ke-20.

Fasisme menggunakan propaganda untuk mempromosikan anti-liberalisme, menolak hak-hak individu, kebebasan sipil, perusahaan bebas dan demokrasi anti-sosialisme, menolak prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan kerangka sosialis mengesampingkan kelompok tertentu, seringkali melalui nasionalisme mereka juga menggunakan kekerasan untuk memperluas pengaruh dan kekuasaan bangsa.

* 1. **Feminisme**

Feminisme adalah gerakan sosial, politik, dan ekonomi. Feminisme adalah sebuah ideologi tentang mengubah cara orang melihat hak laki-laki dan perempuan (terutama perempuan), dan mengkampanyekan kesetaraan gender. Seseorang yang mengikuti feminisme disebut feminis. Feminisme dimulai pada abad ke-18 dengan Pencerahan. Kontroversi atas perbedaan antara jenis kelamin menyebabkan diskusi tentang kesetaraan.

Feminisme dimulai dengan gagasan bahwa hak asasi manusia harus diberikan kepada perempuan. Ide ini dikemukakan oleh beberapa filosof pada abad ke-18 dan 19 seperti Mary Wollstonecraft dan John Stuart Mill.Para feminis kemudian di awal abad ke-20 juga mengatakan bahwa perempuan harus diizinkan untuk memilih dalam demokrasi. Banyak perempuan merasa sangat kuat bahwa mereka harus diizinkan untuk memilih dan ada banyak protes.

* 1. **Ideologi Anarkisme**

Macam ideologi yang terakhir adalah ideologi anarkisme. Ideologi ini menganggap bahwa negara merupakan sebuah gangguan dan tidak perlu ada. Sebagian wilayah di Spanyol menganut menganut ideologi. Ideologi ini menitikberatkan kepada kebebasan setiap individu, di mana sebuah tatanan negara dan politik dianjurkan untuk dibubarkan dan digantikan dengan tindakan sukarela dari setiap warga negara.

Di dalam sistem ini tidak ada hierarki di mana setiap orang dapat memainkan perannya sesuai kehendak masing-masing. Ideologi ini mulanya dianggap relevan namun pada praktiknya banyak terjadi kebingungan dan akhirnya bubar.

# BAB XI PANCASILA DAN HAM

## Definisi Pancasila Dan HAM[[56]](#footnote-56)

Pancasila secara umum dipahami mengandung arti lima dasar. Kelima dasar ini adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pengakuan atas eksistensi Pancasila ini bersifat imperatif atau memaksa. Artinya, siapa saja yang berada di wilayah NKRI, harus menghormati Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia.

Di sisi lain ada HAM, yaitu hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Menurut Oemar Seno Aji (1966), HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai insan ciptaan Allah SWT, sepeti hak hidup, keselamatan, kebebasan dan kesamaaan sifatnya tidak boleh dilangar oleh siapapun dan seolah-olah merupakan holy area. Sementara itu, menurut Kuncoro (1976), HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. G.J.Wollhof menambahkan, “HAM adalah sejumlah hak yang berakat pada tabi’at setiap pribadi manusia, dan tidak dapat dicabut oleh siapapun.”

HAM dalam Pancasila sesunguhnya telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang kemudian diperinci di dalam batang tubuhnya yang merupakan hukum dasar, hukum yang konstitusional dan fundamental bagi negara Republik Indonesia. Perumusan alinea pertama Pembukaan UUD membuktikan adanya pengakuan HAM ini secara universal. Ditegaskan di awal Pembukaan UUD itu tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa di dunia. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dasar-dasar HAM tertuang dalam UUD 1945 Republik Indonesia selanjutnya dapat ditemukan dalam sejumlah pasal Batang Tubuh UUD:

* 1. Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
  2. Pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”
  3. Pasal 29 ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”
  4. Pasal 30 ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”
  5. Pasal 31 ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.

Hubungan antara Pancasila dan HAM di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

* 1. Sila Ketuhanan yang maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama , melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. Sila tersebut mengamanatkan bahwa setiap warga negara bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini selaras dengan Deklarasi Universal tentang HAM (Pasal 2) yang mencantumkan perlindungan terhadap HAM
  2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Sila Kedua, mengamanatkan adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi HAM PBB yang melarang adanya diskriminasi.
  3. Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara warga Negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, hal ini sesuai dengan prinsip HAM Pasal 1 bahwa Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.
  4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Inti dari sila ini adalah musyawarah dan mufakat dalam setiap penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan sehingga setiap orang tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan sendiri, atas inisiatif sendiri yang dapat mengganggu kebebasan orang lain. Hal ini sesuai pula dengan Deklarasi HAM.
  5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Asas keadilan dalam HAM tercermin dalam sila ini, dimana keadilan disini ditujukan bagi kepentingan umum tidak ada pembedaan atau diskriminasi antar individu.

Pemahaman HAM Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap yang hidup di masyarakat berlangsung sudah cukup lama. Bagir Manan pada bukunya “Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia” ( 2001 ) membagi perkembangan HAM di Indonesia dalam dua periode yaitu: (1) periode sebelum Kemerdekaan dan (2) periode setelah Kemerdekaan.

1. Periode Sebelum Kemerdekaan. Pada periode ini ada beberapa upaya menuju diraihnya HAM seperti:
2. Periode ini diisi dengan Boedi Oetomo, yang telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat kepada pemerintah colonial. Perhimpunan Indonesia, lebih menitikberatkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri.
3. Sarekat Islam, yang menekankan pada upaya untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan deskriminasi rasial. Dan ada beberapa organisasi lain yang bergerak dengan prinsip HAM seperti Partai Nasional Indonesia, mengedepankan pada hak untuk memperoleh kemerdekaan. Pemikiran tentang HAM pada periode ini juga terjadi perdebatan dalam sidang BPUPKI antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dengan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin pada pihak lain. Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan.
4. Periode Setelah Kemerdekaan. Pemikiran HAM pada periode ini adalah dalam upaya pembelaan hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Periode ini ditandai dengan adanya semangat kuat untuk menegakkan HAM, walaupun pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an penegakan HAM mengalami kemunduran, Pemerintah pada periode Orde Baru bersifat defensif dan represif yang dicerminkan dari produk hukum yang umumnya restriktif terhadap HAM. Desakan bagi negara untuk makin menghormati HAM direspons dengan kelahiran Komisi Nasional HAM, yang pada tahap-tahap awal pembentukannya menuai keraguan, namun ternyata cukup mendatangkan optimisme. Pada periode 1998 dan setelahnya, dengan pergantian rezim pemerintahan pada tahun 1998 terlihat dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia, misalnya dengan dilakukannya amandemen UUD 45 dan beberapa peraturan perundang–undangan yang ada

Apabila HAM ini diklasifikasi, maka terdapat beberapa kelompok hak sebagai berikut:

* 1. Hak-hak pribadi *(personal rights)* meliputi kebebasan menyatakn pendapat, kebebasan memeluk agama.
  2. Hak-hak ekonomi *(property rights)* hak untuk memiliki sesuatu, membeli atau menjual serta memanfaatkannya.
  3. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan *(rights of legal equality)*.
  4. Hak-hak asasi politik *(political rights)* yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan.
  5. Hak-hak asasi sosial dan budaya *(social and cultural rights)*misalnya hak untuk memilih pendidikan.
  6. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan*,*peraturan dalam hal penangkapan *(procedural rights)*.

Jadi singkat kata, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia sudah memberikan jaminan bahwa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sejalan dengan HAM. Oleh sebab itu, penghormatan kita terhadap HAM harus bersifat juga berskala universal. Kita menerapkan HAM dengan tidak mengenyampingkan nilai-nilai keluhuran sebagai manusia Indonesia.

# BAB XII PELAKSANAAN HAM DALAM UUD RI 1945

## Definisi Pelaksanaan HAM Dalam UUD RI 1945[[57]](#footnote-57)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang. Jaminan kebebasan HAM telah diatur melalui beberapa pasal dalam UUD 1945.  
Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. HAM juga merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM bersifat universal. Artinya, dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Muhammad Ridha Iswardhana, hak asasi manusia dicirikan dengan beberapa hal sebagai berikut:

* 1. Melekat sejak manusia lahir sebagaimana melekat pada setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Negara, aturan hukum, dan setiap orang wajib memberikan penghormatan dan perlindungan serta tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap hak dasar manusia.
  3. Berlaku bagi setiap orang tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, dan kelompok apapun.

Berdasarkan Deklarasi Universal HAM yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948, hak yang dilindungi dalam deklarasi mencakup hal-hal berikut ini:

* 1. Hak hidup
  2. Bebas dari perbudakan
  3. Bebas dari penyiksaan dan kekejaman
  4. Persamaan dan bantuan hukum
  5. Pengadilan yang adil
  6. Perlindungan urusan pribadi dan keluarga
  7. Memasuki dan meninggalkan suatu negara
  8. Mendapatkan suaka
  9. Hak kewarganegaraan
  10. Membentuk keluarga
  11. Memiliki harta benda
  12. Kebebasan beragama
  13. Berpendapat, berserikat, dan berkumpul
  14. Turut serta dalam pemerintahan
  15. Jaminan sosial, pekerjaan, upah layak, dan kesejahteraan
  16. Memperoleh pendidikan dan kehidupan kebudayaan

**Pasal Tentang HAM[[58]](#footnote-58)**

Jaminan kebebasan HAM diatur dalam konstitusi. Hak asasi manusia dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 28A-J. Selain itu, HAM turut diatur dalam pasal 27 hingga pasal 34. Berikut 10 pasal yang mengatur tentang HAM:

* + - 1. **Pasal 28A**

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

* + - 1. **Pasal 28B**

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

* + - 1. **Pasal 28C**

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

* + - 1. **Pasal 28D**

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

* + - 1. **Pasal 28E**

(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

* + - 1. **Pasal 28F**

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

* + - 1. **Pasal 28G**

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

* + - 1. **Pasal 28H**

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

* + - 1. **Pasal 28I**

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

* + - 1. **Pasal 28J**

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

## Karakteristik Pelaksanaan HAM Dalam UUD RI 1945[[59]](#footnote-59)

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, dan mempunyai derajat yang luhur sebagai manusia, mempunyai budi dan karsa yang merdeka sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Semua manusia memiliki martabat dan derajat yang sama di semua sendi kehidupan, dan memiliki hak-hak yang sama pula di hadapan hukum maupun dalam bidang apapun tanpa terkecuali. Derajat manusia yang luhur berasal dari Tuhan yang menciptakannya, bukanlah berasal dari sebuah pemberian ataupun hadiah sesama manusia. Dengan demikian semua manusia bebas mengembangkan dirinya sesuai dengan budinya yang sehat, jernih dan bermartabat. Sebagai mahkluk ciptaan Tuhan, semua manusia memiliki hak-hak yang sama sebagai manusia. Hak-hak yang sama sebagai manusia inilah yang sering disebut hak asasi manusia. Hak asasi manusia berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, maksudnya hak-hak yang dimiliki manusia merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia sebagai manusia yang berasal dari Tuhan, dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

Sebagaimana definisi menurut UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik hak yang dimiliki manusia ini tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, tidak ada yang paling penting antar karakteristiknya, oleh karenanya karakteristik HAM bersifat saling mengikat antar komponen. Pertama, bersifat Universal (universality). Artinya universalitas hak tidak dapat berubah atau tidak dialami dengan cara yang sama oleh semua orang. Hak asasi bersifat umum, semua orang tanpa terkecuali, mendapatkannya secara cuma-cuma dan bukan karena kedudukan atau jabatan yang diembannya. Kedua, martabat manusia (human dignity). Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan dimiliki setiap manusia di dunia tanpa terkecuali, dari dalam kandungan hingga manusia tersebut mati. Prinsip HAM ditemukan pada pikiran setiap individu, tanpa memperhatikan umur, budaya, keyakinan, etnis, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, kemampuan atau kelas sosial lainnya. Setiap manusia, oleh karenanya, harus dihormati dan dihargai hak asasinya. Konsekuensinya, semua orang memiliki status hak yang sama dan sederajat dan tidak bisa digolong-golongkan berdasarkan tingkatan hirarkis.

Ketiga, kesetaraan (equality). Konsep kesetaraan mengekspresikan gagasan menghormati harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia. Secara spesifik pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa ”setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya”. Keempat, Non diskriminasi (non-discrimination). Non diskriminasi terintegrasi dalam kesetaraan. Prinsip ini memastikan bahwa tidak seorangpun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, seperti misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, kepemilikan, status kelahiran atau lainnya. Kelima, Tidak dapat dicabut (inalienability). Hak-hak individu tidak dapat direnggut, dilepaskan dan dipindahkan. Namun, hak asasi manusia dapat dibatasi sepanjang untuk alasan yang dibenarkan menurut hukum yang berlaku pada suatu negara, misalnya apabila seseorang melakukan tindak pidana, dengan ancaman kurungan penjara. Artinya, hak-hak asasi warga binaan yang dipenjara tidak lantas tidak dapat dikurangi, seperti hak mendapat hiburan, berwisata, bahkan makan dan minum-pun semua dibatasi.

Keenam, Tak bisa dibagi (indivisibility). HAM-baik hak sipil, politik, sosial, budaya, ekonomi-semuanya bersifat inheren, yaitu menyatu dalam harkat martabat manusia. Pengabaian terhadap satu hak akan menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak lainnya. Hak setiap orang untuk bisa memperoleh penghidupan yang layak adalah hak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hak tersebut merupakan hak dasar bagi setiap orang agar bisa menikmati hak-hak lainnya seperti hak atas kesehatan atau hak atas pendidikan. Ketujuh, Saling berkaitan dan bergantung (interrelated and interdependence). Pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contohnya, dalam situasi tertentu, hak atas pendidikan atau hak atas informasi adalah saling bergantung satu sama lain. Misalnya, apabila hak terhadap pendidikan tidak didapat seseorang, maka akan berdampak pada hak memperoleh pekerjaan, berimplikasi terhadap hak atas kesejahteraan dan tentu berpengaruh terhadap hak hidup secara layak. Oleh karena itu pelanggaran terhadap suatu hak akan saling bertalian, hilangnya satu hak mengurangi hak lainnya.

Terakhir, Tanggung jawab negara (state responsibility). Negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk menaati hak asasi. Bahkan, di Indonesia sendiri hal ini ditegaskan lagi melalui kebijakan Presiden Jokowi melalui Nawacita, bahwa negara harus hadir kepada segenap warga negaranya, melalui serangkaian instrumen HAM yang disahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, masyarakat dalam hal ini, harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum di dalam instrumen-instrumen HAM. Seandainya pemerintah gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak, sebelum tuntutan itu diserahkan pada sebuah pengadilan yang kompeten atau adjudikator (penentu) lain yang sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku.

**HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN UUD 1945[[60]](#footnote-60)**

Hak asasi merupakan hak dasar manusia yang dibawa sejak lahir oleh setiap diri manusia. Kemudian untuk menjamin dan melindungi hak asasi tersebut pemerintah mengaturnya dalam [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](https://rendratopan.com/2018/12/10/undang-undang-dasar-1945/).

Sesuai dengan BAB XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa yang termasuk kepada hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
3. Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia.
5. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dan membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
6. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
7. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
8. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
9. Hak atas status kewarganegaraan.
10. Hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilh pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
11. Berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
12. Berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
13. Berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan  segala jenis saluran yang tersedia.
14. Berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
15. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
16. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
17. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakukan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
18. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
19. Hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oelh siapapun
20. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan untuk diakui sebagai pribadi dihadapan, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
21. Hak bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan terhadap perlakukan yang diskriminatif itu.
22. Hak untuk berbudaya sebagai identitas masyarakat tradisional.

Hal-hal tersebut di atas merupakan hak asasi manusia yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kemudian diatur lebih lanjut dalam [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999](https://rendratopan.com/2019/01/01/undang-undang-nomor-39-tahun-1999-tentang-hak-asasi-manusia/) tentang Hak Asasi Manusia.

# BAB XIII TINDAK PIDANA KORUPSI

## Definisi Tindak Pidana Korupsi

Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin : corruptio = penyuapan; corruptore = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.[[61]](#footnote-61)

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Kartono menjelaskan:

Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.[[62]](#footnote-62)

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah:

* 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
  2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).[[63]](#footnote-63)

Sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam undang-undang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :

* 1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah.
  2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.[[64]](#footnote-64)

Batasan mengenai Perekonomian Negara menurut UU tersebut sebagai berikut: kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pasa kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Undang-undang bermaksud mengantisipasi atas penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang dirasa semakin canggih dan rumit. Oleh karenanya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan seluas-luasnya sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum.

Dengan rumusan tersebut, perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Perbuatan melawan hukum disini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana sesuai Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Selanjutnya Tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap di pidana sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, dimana pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya.

Dalam undang-undang ini juga diatur perihal korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana dimana hal ini tidak diatur sebelumnya yakni dalam undang-undang tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.

Undang-undang ini bertujuan dalam memberantas tindak pidana korupsi memuat ketentuan-ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara sesuai dengan Pasal 18.

Pengertian Pegawai Negeri dalam undang-undang ini juga disebutkan yaitu orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Fasilitas yang dimaksud adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian apabila terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung RI. Sedangkan proses penyidikannya dan penuntutannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa (sesuai dengan Pasal 26 dan Pasal 27).

Dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada Bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia dapat dibaca pada Pasal 29 tentang rahasia Bank

## Karakteristik Tindak Pidana Korupsi

Secara umum bentuk-bentuk, karakteristik atau ciri-ciri, dan unsur-unsur (dari sudut pandang hukum) korupsi sebagai berikut:[[65]](#footnote-65)

* 1. Penyuapan (*bribery*) mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang.
  2. Embezzlement, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu.
  3. *Fraud*, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (trickery or swindle). Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.
  4. *Extortion*, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional.
  5. *Favouritism*, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.
  6. Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara.
  7. Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau “korupsi berjama’ah”.

## Bentuk-Bentuk Korupsi

Diantara model-model korupsi yang sering terjadi secara praktis adalah: pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, pemberian (hadiah atau hibah) yang berkaitan dengan jabatan atau profesi seseorang Jeremy Pope mengutip dari Gerald E. Caiden dalam *”Toward a General Theory of Official Corruption”*menguraikan secara rinci bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal, yaitu:[[66]](#footnote-66)

* 1. Berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan.
  2. Penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
  3. Penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana.
  4. Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan,memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.
  5. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras.
  6. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.
  7. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu.
  8. Penyuapan dan penyogokan, memeras, menguti pungutan, memintakomisi.
  9. Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul.
  10. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; membuat laporan palsu
  11. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah.
  12. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang.
  13. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.
  14. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.
  15. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
  16. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
  17. Perkoncoan, menutupi kejahatan.
  18. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.
  19. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan. Sedangkan menurut Aditjondro.



## Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum.

2. Memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.[[67]](#footnote-67)

Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Sebagai akibat dari perumusan ketentuan tersebut, meskipun suatu perbuatan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

* 1. Berada dalam penguasaam, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah.
  2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.



## Sebab-Sebab Tindak Pidana Korupsi

Sebelum suatu bangsa melakukan suatu tindakan untuk penanggulangan korupsi, ada baiknya apabila terlebih dahulu pemerintah dari bangsa yang bersangkutan mencari lebih dahulu faktor-faktor apa sebenarnya yang menyebabkan atau yang mendorong timbulnya korupsi di negara tersebut, sehingga nantinya tindakan yang diambil tersebut merupakan tindakan yang tepat.

Apabila kita merenungkan sejenak untuk memikirkan apakah sebenarnya yang menyebabkan timbulnya korupsi itu di negara kita ini. Untuk itu penulis memberanikan diri untuk memberi jawaban.

Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi.

Menurut Sarlito W. Sarwono dalam berita yang ditulis oleh Masyarakat Transparansi Indonesia, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas, yakni:

* 1. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya),
  2. Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya.[[68]](#footnote-68)

Andi Hamzah dalam disertasinya menginventarisasikan beberapa penyebab korupsi, yakni:

* + 1. Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat;
    2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;
    3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi;
    4. Modernisasi pengembangbiakan korupsi.[[69]](#footnote-69)

# BAB IVX PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN

## Definisi Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan

Pancasila sebagai paradigma mempunyai arti bahwa Pancasila merupakan sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah/tujuan bagi sebuah bangsa. Berdasarkan alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang disebut hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Atas dasar itu, Pancasila dijadikan landasan pembangunan yang ideal karena nilai-nilainya sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya bangsa Indonesia.[[70]](#footnote-70)

1. **Makna Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan**

Dikutip dari buku 'Modul Pelatihan Guru Mata Pelajaran PPKn SMA/SMK' yang ditulis Mukiyat dkk, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki arti bahwa segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti bahwa pembangunan nasional memiliki tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek rohani, jasmani, aspek individu, sosial, dan ketuhanan.

Sementara itu, melansir bpkad.banjarkab.go.id, makna Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan adalah nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi kerangka acuan setiap aspek pembangunan nasional di Indonesia. Ini merupakan konsekuensi pengakuan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara.

Adapun berbagai bidang yang menyandang Pancasila sebagai paradigma pembangunan antara lain:[[71]](#footnote-71)

* 1. **Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Bidang Ekonomi**

Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah harus berlandaskan Pancasila terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pijakan ekonomi kerakyatan, kebijakan ekonomi harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, pembangunan ekonomi harus berdasarkan moralitas kemanusiaan dan Ketuhanan.

* 1. **Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Bidang Politik**

Pembangunan bidang politik ditujukan untuk membentuk pemerintahan demokratis yang menjunjung kebebasan berpendapat serta melayani tuntutan rakyat secara adil, terbuka, jujur, dan akuntabel. Dalam hal ini Pancasila memberikan dasar-dasar moralitas politik negara yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

* 1. **Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum**

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah salah satu tujuan negara Indonesia. Maka dari itu, untuk mewujudkannya, diperlukan perlindungan hukum kepada semua warga negara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila.

* 1. **Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Sosial Budaya**

Pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Kemudian berdasarkan sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap budaya-budaya yang beragam di Nusantara.

# DAFTAR PUSTAKA

**BUKU**

Edi Rohani. (2019). Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan. Jakarta: Almuqsith Pustaka.

Hartanti, Evi. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kartono, Kartini. (2003). *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

R. Wiyono. (2005). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta.

**MAKALAH**

Aldi Arianta. Dkk. (2020). *Tinjauan Pancasila Dari Segi Historis Kultural, Yuridis, Dan Filosofis.* Makalah.

**WEBSITE**

Asal Mula Lahirnya Pancasila Sebagai Ideologi Negara, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/asal-mula-lahirnya-pancasila-sebagai-ideologi-negara-1tVY7lUga3Y/full>

Ayu Ma’as, Pengertian Lembaga Negara Indonesia Dan Jenis-Jenisnya, <https://kids.grid.id/read/472896569/pengertian-lembaga-negara-indonesia-dan-jenis-jenisnya?page=all>

Besar, Hubungan Pancasila Dan Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia, <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pancasila-sebagai-landasarn-pengaturan-ham-di-indoensia/>

Eddy Suhartono, Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. http/www/google.com/korupsi

Fahri Zufikar, Makna Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan, Ini Penjelasannya, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5619788/makna-pancasila-sebagai-paradigma-pembangunan-ini-penjelasannya>

Herman Firdaus, Makalah Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, <https://www.blogbarabai.com/2014/10/makalah-pancasila-dalam-konteks-sejarah.html>

<https://www.duniapengertian.com/2016/09/pengertian-korupsi-serta-karakteristik.html>

<https://www.gramedia.com/literasi/makna-pancasila-sebagai-ideologi-negara/>

Ilham Choirul Anwar & Yandri Daniel Damaledo (Ed), Mengenal apa itu Trias Politica yang diterapkan di pemerintahan Indonesia, <https://tirto.id/mengenal-apa-itu-trias-politica-yang-diterapkan-di-indonesia-f7Do>

Kristina, Ini Lho 10 Pasal dalam UUD 945 yang Mengatur Tentang HAM, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5713321/ini-lho-10-pasal-dalam-uud-1945-yang-mengatur-tentang-ham>

Landasan Historis, Kultural, Yuridis dan Filosofis Pancasila, <http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/07/landasan-historis-kultural-yuridis-dan.html>

Pancasila Sebagai Sistem Filsafat: Makna dan Karakteristiknya, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pancasila-sebagai-sistem-filsafat-makna-dan-karakteristiknya-1vqqzE8FTKb/full>

Permadi Suntama, Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa, <https://tirto.id/arti-penting-uud-negara-republik-indonesia-tahun-1945-bagi-bangsa-gjuM>

Rendra Topan, HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN UUD 1945, <https://rendratopan.com/2019/08/28/hak-asasi-manusia-berdasarkan-uud-1945/>

Rifan Aditya, Amandemen UUD 1945, Tujuan, dan Beberapa Bentuk Perubahan Fundamentalnya, <https://www.suara.com/news/2020/12/11/084041/amandemen-uud-1945-tujuan-dan-beberapa-bentuk-perubahan-fundamentalnya?page=all>

Rizky Adha mahendra, Pengertian Amandemen UUD 1945 Dan Cara Mengubah Konstitusi, <https://www.harianhaluan.com/pendidikan/pr-101164251/pengertian-amandemen-uud-1945-dan-cara-mengubah-konstitusi?page=all#:~:text=Lantas%2C%20apa%20yang%20dimaksud%20dengan,terperinci%20dari%20UUD%20yang%20asli>.

Sarah Nafisah, Pancasila Sebagai Ideologi Negara, Inilah Pengertian Dan Fungsinya Bagi Masyarakat Indonesia, <https://bobo.grid.id/read/082413123/pancasila-sebagai-ideologi-negara-inilah-pengertian-dan-fungsinya-bagi-masyarakat-indonesia?page=all>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasca Amandmen), <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-pasca-amandemen>

Wahyono, Memahami Karakteristik Hak Asasi Manusia, <https://ham.go.id/2016/06/14/memahami-karakteristik-hak-asasi-manusia/>

Wida Kurniasih, Idelogi: Pengertian, Fungsi, Sejarah dan Jenisnya, <https://www.gramedia.com/literasi/ideologi/>

**Lampiran 1 Laporan Kedua Modul Ajar Teori**

**(PANCASILA)**

# METODE PENELITIAN

#### PROGRAM STUDI

**D4 TEKNIK INFORMATIKA**

Oleh:

#### Widaningsih, S.Psi, SH, MH

##### NIDN 0018038104



###### POLITEKNIK NEGERI MALANG

**Desember 2022**

#### HALAMAN PENGESAHAN

#### MODUL AJAR

1. Judul Modul Ajar : Pancasila
2. Penulis :
   1. Nama : Widaningsih, S.Psi, SH, MH
   2. NIP/NIDN : 198103182010122002/0018038104
   3. Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / IIId
   4. Jabatan Funsgional : Lektor
   5. Program Studi : D-VI Teknologi Informasi
   6. Jurusan : Teknik Informatika
3. Bidang Ilmu : Hukum
4. Lama kegiatan : … s/d …
5. Sumber Dana : Modul ajar ini dibiayai dengan dana

DIPA Nomor SP DIPA........................

Bidang I Politeknik Negeri Malang

Malang, Desember 2022

Menyetujui,

Pembantu Direktur I, Penulis Utama,

###### Dr. Kurnia Ekasari, SE., M.M., Ak. Widaningsih, S.Psi, SH, MH

NIP 196602141990032002 NIP 198103182010122002

###### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Widaningsih, S.Psi, SH, MH

NIP/NIDN : 198103182010122002/0018038104

Bidang Ilmu : Hukum

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / IIId

Jabatan Fungsional : Lektor

Jurusan/Program Studi : Teknologi Informasi / D-IV Teknik

Informatika

Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Malang

Dengan ini menyatakan bahwa:

* 1. Naskah modul ajar bidang ilmu “Hukum” dengan judul:

”Pancasila”

Belum pernah diterbitkan dan bebas dari plagiarisme.

* 1. Bersedia menuntaskan naskah modul ajar sesuai waktu yang ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Malang, Desember 2022

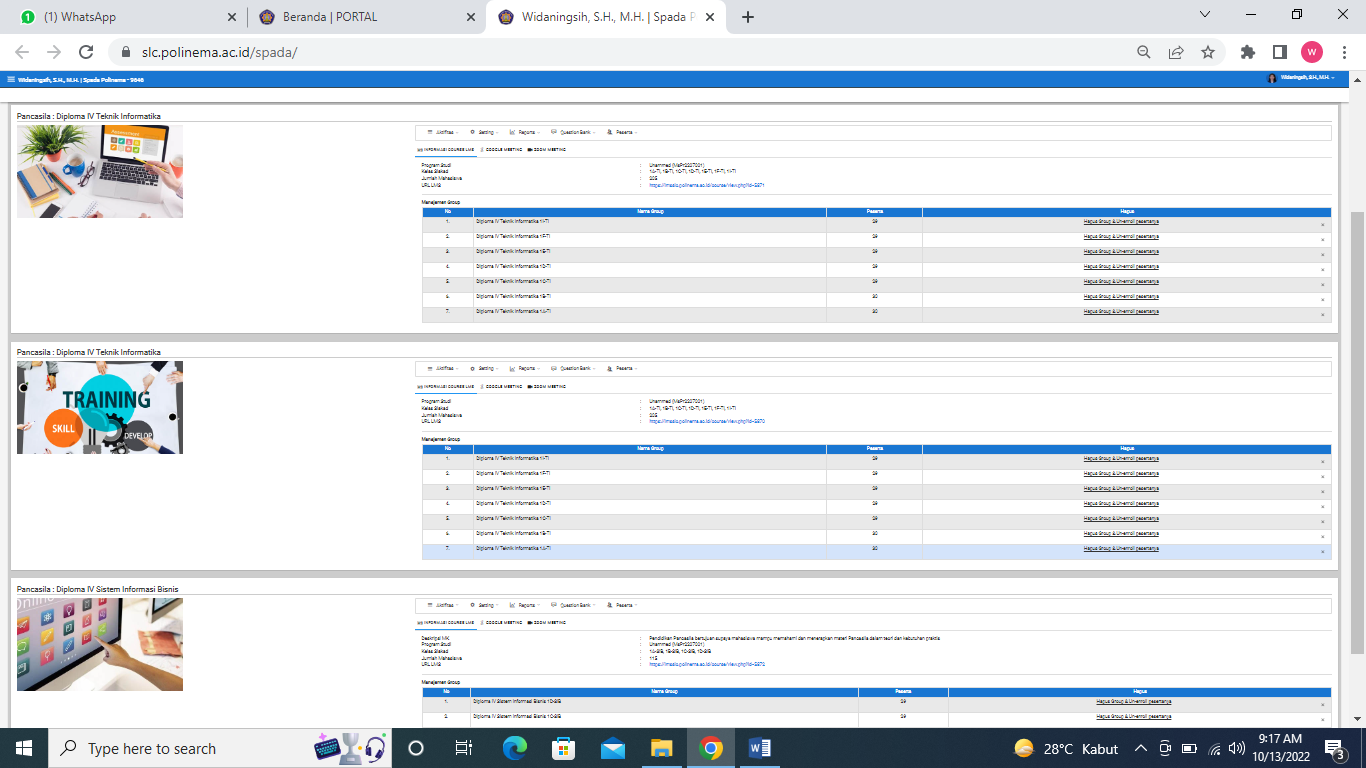
Mengetahui,

Pembantu Direktur I, Yang menyusun,

###### Dr. Kurnia Ekasari, SE., M.M., Ak. Widaningsih, S.Psi, SH, MH

NIP 196602141990032002 NIP 198103182010122002

###### Lampiran 2 Tampilan LMS



**Lampiran 3 Form Penilaian**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**POLITEKNIK NEGERI MALANG**

Jl. Soekarno Hatta No.9 Malang 65141

Telp (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420

[http://www.polinema.ac.id](http://www.polinema.ac.id/)

###### FORMULIR PENILAIAN DESK EVALUASI USULAN

**INSENTIF MODUL TEORI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Nama dosen : ................................................

NIP/NIDN/NIDK : ................................................

Nama mata kuliah : ................................................

Program studi : ................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kriteria** | **Ya** | **Tidak** |
| 1. | Dosen memenuhi ketentuan status kepegawaian |  |  |
| 2. | Mata kuliah belum pernah didanai sebelumnya |  |  |
| 3. | Dosen pengusul tidak mengajukan usulan lebih dari 1 pada semester yang sama |  |  |
| 4. | Mata kuliah tersedia pada semester berjalan pada prodi yang diusulkan |  |  |
| 5. | RPS tersedia |  |  |
| 6. | Dosen merupakan pengajar mata kuliah |  |  |

Mengetahui,   
Pembantu Direktur I

###### Dr. Kurnia Ekasari, SE., M.M., Ak.

NIP 196602141990032002

Malang, Desember 2022

Reviewer,

(..............................................) NIP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**POLITEKNIK NEGERI MALANG**

Jl. Soekarno Hatta No.9 Malang 65141

Telp (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420

[http://www.polinema.ac.id](http://www.polinema.ac.id/)

###### FORMULIR PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI

**INSENTIF MODUL TEORI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Nama dosen : ......................................................................................

NIP/NIDN/NIDK : ......................................................................................

Nama mata kuliah : ......................................................................................

Program studi : ......................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kriteria** | **Ya** | **Tidak** |
| 1. | Jumlah minggu tersedia dari minggu ke-1 s/d 17 |  |  |
| 2. | Naskah modul ajar tersedia sesuai pedoman dalam bahasa yang digunakan |  |  |
| 3. | Materi berupa slide tersedia minggu ke-1 s/d 17 |  |  |
| 4. | Tampilan LMS sesuai contoh |  |  |

Mengetahui,   
Pembantu Direktur I

###### Dr. Kurnia Ekasari, SE., M.M., Ak.

NIP 196602141990032002

Malang, Desember 2022

Reviewer,

(...............................................)NIP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**POLITEKNIK NEGERI MALANG**

Jl. Soekarno Hatta No.9 Malang 65141

Telp (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420

[http://www.polinema.ac.id](http://www.polinema.ac.id/)

###### CHECK-LIST KELENGKAPAN MODUL DARING TEORI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama** | **Mata kuliah** | **Jenis** | **Link** | **RPS** | **Bahan Ajar mg ke-1** | | | | **Bahan Ajar mg ke…** | | | | **Bahan Ajar mg ke-12** | | | | **Ket.** |
| **CP** | **Slide** | **Int/ext source** | **Modul teks** | **CP** | **Slide** | **Int/ext source** | **Modul teks** | **CP** | **Slide** | **Int/ext source** | **Modul teks** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Lampiran 4 Tampilan RPS**

|  | | **POLITEKNIK NEGERI MALANG**  **JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**  **PROGRAM STUDI : D4 TEKNIK INFORMATIKA** | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MATA KULIAH** | | **KODE** | | **RUMPUN MATA KULIAH** | | | | **BOBOT (sks)/jam** | | | **SEMESTER** | | **TGL. PENYUSUNAN** | | | |
| Pancasila | | **RTI211001** | | **IMKU, Wajib, dan Penunjang** | | | | **2SKS/2JAM** | | | **1** | | Agustus 2022 | | | |
| **OTORISASI** | | **Dosen Pengembang RPS** | | | | | | **Koordinator RMK** | | | **Ka PRODI** | | | | | |
| **Widaningsih, S.Psi, SH, MH** | | | | | | Atiqah Nurul Asri, S.Pd., M.Pd. | | | Imam Fahrur Rozi, ST., MT. | | | | | |
| **Capaian Pembelajaran (CP)** | | **Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)** | | | | | | | | |  | | | | | |
| S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika.  S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila.  S4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.  S5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.  S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.  S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.  KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada mata kuliah (CPL-MK)** | | | | | | | | | | | |  | | |
| Menguasai konsep ideologi, kelembagaan, dan aturan dalam negara; menunjukkan sikap nasionalisme, kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan taat hukum; mampu menunjukkan kinerja mandiri dalam menyelesaikan tugas dengan memperhatikan nilai, norma dan etika akademik | | | | | | | | | | | | | | |
| **Diskripsi Singkat Mata Kuliah** | | Mampu memahami sejarah, landasan, serta filosofi & kedudukan pancasila sehingga dijadikan sebagai dasar Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |
| **Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan** | | 1. Pendidikan pancasila dalam tinjauan historis & cultural 2. Pendidikan pancasila dalam tinjauan yuridis & filosofis 3. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia 4. Pancasila sebagai sistem filsafat 5. UUD RI 1945 6. Amandemen UUD RI 1945 7. Trias Politika dalam Negara RI 8. Kelembagaan Negara menurut UUD RI 1945 9. Pancasila sebagai ideologi nasional 10. Ideologi Lain yang berkembang di dunia 11. Pancasila dan HAM 12. Pelaksanaan HAM dalam UUD RI 1945 13. Tindak Pidana Korupsi 14. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pustaka** | | **Utama :** | | | |  | | | | | | | | | | |
| Modul Ajar Pancasila | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pendukung :** | | | |  | | | | | | | | | | |
| 1. Sri Hudiarini, dkk, Pendidikan Pancasila Dalam Perspektif Historis dan Ketatanegaraan Republik Indonesia Edisi Revisi, Aditya Media Publishing, 2016, Yogyakarta 2. Muhammad Noor Syam, Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (Sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional), Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang, 2000, Malang | | | | | | | | | | | | | | |
| **Media Pembelajaran** | | **Software :** | | | | | **Hardware :** | | | | | | | | | |
| Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Powet Point  Tatap Muka Penuh (*luring*) | | | | | Komputer/Laptop | | | | | | | | | |
| **Nama Dosen Pengampu** | | **Widaningsih, S.Psi, SH, MH** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Matakuliah Syarat** | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Minggu Ke** | **Kemampuan Akhir Yang Direncanakan**  **(Sub-CP-MK)** | | **Bahan kajian**  **(Materi Pembelajaran)** | | **Bentuk dan Metode Pembelajaran** | | | | **Estimasi Waktu** | **Pengalaman Belajar Mahasiswa** | | **Kriteria & Bentuk Penilaian** | | | **Indikator Penilaian** | **Bobot Penilaian (%)** |
| **(1)** | **(2)** | | **(3)** | | **(4)** | | | | **(5)** | **(6)** | | **(7)** | | | **(8)** | **(9)** |
| 1 | 1. Mengenal tujuan akhir matakuliah 2. Mampu menjelaskan definisi pancasila secara historis dan kultural. 3. Mampu memahami konsep pancasila secara historis dan kultural | | 1. Tujuan akhir perkuliahan 2. Definisi pancasila secara historis dan kultural | | **Bentuk :** Kuliah   * Tatap Muka Penuh (*luring*) (1x50’) **Asinkron** → video pembelajaran * Tatap Muka Penuh (*luring*) (1x50’) **Sinkron** → Vcon , diskusi   **Metode pembelajaran:**  *Contextual Teaching and Learning (CTL)*  **Penugasan:**  **Tugas 1**: Mencari contoh studi kasus dalam kehidupan sehari hari yang sesuai dengan penerapan pancasila  (1x50’) *Offline* | | | | 1x3x 50” | * Mengetahui tujuan akhir perkuliahan * Mengetahui definisi pancasila secara historis dan kultural   Memahami konsep definisi pancasila secara historis dan kultural | | **Kriteria:**  Ketepatan dan penguasaan  **Bentuk penilaian:**   * Presentasi * Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab (afektif) * pertanyaan tentang definisi pancasila | | | Bentuk : Tes Lisan  Kriteria :   * Kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan dan menjawab pertanyaan tentang definisi pancasila secara historis dan kultural | **3%** |
| 2 | Mampu menjelaskan definisi pancasila secara yuridis dan filosofis | | Definisi Pancasila secara yuridis dan filosofis | | **Bentuk :** Kuliah   * Tatap Muka Penuh (*luring*) (1x50’) **Asinkron** → video pembelajaran * Tatap Muka Penuh (*luring*) (1x50’) **Sinkron** → Vcon, diskusi   **Metode Pembelajaran:**   * *Contextual Teaching and Learning (CTL)*   **Penugasan: Tugas 2** : Mencari contoh Definisi Pancasila secara yuridis dan filosofis  (1x50’) *Offline* | | | | 1x3x 50” | * Memahami dan menjelaskan definisi pancasila secara yuridis dan filosofis | | **Kriteria:**  Ketepatan dan penguasaan materi  **Bentuk penilaian:**   * Presentasi * Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab (afektif) * Daya tarik penjelasan materi | | | * Kesesuaian dan kejelasan dalam menjawab dan menjelaskan mengenai tentang definisi Pancasila secara yuridis dan filosofis | **3%** |
| 3 | Mampu menjelaskan Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia | | Mampu menjelaskan Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia | | **Bentuk :** Kuliah   * Tatap Muka Penuh (*luring*) (1x50’) **Asinkron** → video pembelajaran * Tatap Muka Penuh (*luring*) (1x50’) **Sinkron** → Vcon, diskusi   **Metode Pembelajaran:**   * *Contextual Teaching and Learning (CTL)*   **Penugasan: Tugas 3**: presentasi secara individu dengan topic terkini (1x50’) *Offline* | | | | 1x3x  50 | * Memahami Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia * Menjelaskan Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia | | **Kriteria:**  Ketepatan dan penguasaan materi  **Bentuk penilaian:**   * Presentasi * Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab (afektif) | | | * Ketepatan mahasiswa menjelaskan definisi Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia | **3%** |
| 4 | KUIS 1 | | Evaluasi | | Tugas mandiri menyusun essay | | | | 1x3x 50 | **-** | | **-** | | | **-** | **10%** |
| 5 | Mampu menjelaskan tentang definisi Pancasila sebagai sistem filsafat | | * Definisi Pancasila sebagai sistem filsafat | | **Bentuk :** Kuliah   * Tatap Muka Penuh (*luring*)) (1x50’) **Asinkron** → video pembelajaran * Tatap Muka Penuh (*luring*)(1x50’) **Sinkron** → Vcon, diskusi   **Metode Pembelajaran:**   * *Contextual teaching and Learning (CTL)*   **Penugasan: Tugas 5 diskusi kelompok tentang** Pancasila sebagai system filsafat (1x50’) *Offline* | | | | 1x3 x50 | * Memahami dan menjelaskan tentang definisi Pancasila sebagai sistem filsafat | | **Kriteria :**   * Ketepatan jawaban * Kreativitas pemecahan masalah * Daya tarik komunikasi   **Bentuk penilaian:**  diskusi kelompok | | | * Ketepatan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan tentang definisi Pancasila sebagai sistem filsafat | **3%** |
| 6 | Mampu menjelaskan serta menguraikan UUD RI 1945 dan amandemen UUD RI 1945 | | Mampu menjelaskan serta menguraikan UUD RI 1945 dan amandemen UUD RI 1945 | | **Bentuk :** Kuliah   * Tatap Muka Penuh (*luring*) (1x50’) **Asinkron** → video pembelajaran * Tatap Muka Penuh (*luring*) (1x50’) **Sinkron** → Vcon, diskusi   **Metode Pembelajaran:**   * *Contextual teaching and Learning (CTL)*   **Penugasan: Tugas 6 diskusi kelompok tentang** konsep UUD 1945 dan amandemen UUD RI 1945 (1x50’) *Offline* | | | | 1x3x 50 | * Memahami konsep tentang   UUD 1945 dan amandemen UUD RI 1945 | | **Kriteria :**   * Kejelasan menjawab pertanyaan * Kejelasan isi materi * Kesesuaian tulisan * Mudah dipahami oleh pembaca * **Bentuk penilaian:** * diskusi kelompok | | | * Ketepatan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan tentang UUD 1945 dan amandemen UUD 1945 * Kejelasan isi materi yang ditulis mahasiswa | **3%** |
| 7 | Mampu menjelaskan serta menguraikan Trias Politika dalam Negara RI | | Definisi Trias Politika dalam Negara RI | | **Bentuk :** Kuliah   * Tatap Muka Penuh (*luring*) (1x50’) **Asinkron** → video pembelajaran * Tatap Muka Penuh (*luring*) (1x50’) **Sinkron** → Vcon, diskusi   **Metode Pembelajaran:**   * *Contextual teaching and Learning (CTL)*   **Penugasan: Tugas 5 diskusi kelompok tentang** Trias Politika dalam Negara RI  (1x50’) *Offline* | | | | 1x3x 50 | * Menjawab pertanyaan dan membahas Trias Politika dalam Negara RI | | **Kriteria:**  Ketepatan dan penguasaan  **Bentuk penilaian:**   * Presentasi * Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab (afektif) pertanyaan tentang Trias Politika dalam Negara RI | | | * Ketepatan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan * Ketepatan mahasiswa dalam melakukan presentasi Trias Politika dalam Negara RI dan mengemasnya menjadi sebuah presentasi yang baik dan menarik | **3%** |
| 8 | Mampu menjelaskan dan menguraikan Kelembagaan Negara menurut UUD RI 1945 | | Definisi Kelembagaan Negara menurut UUD RI 1945 | | **Bentuk :** Kuliah   * Tatap Muka Penuh (*luring*) (1x50’) **Asinkron** → video pembelajaran * Tatap Muka Penuh (*luring*) (1x50’) **Sinkron** → Vcon, diskusi   **Metode Pembelajaran:**   * *Contextual teaching and Learning (CTL)*   **Penugasan: Tugas : diskusi kelompok tentang** kelembagaan negara menurut UUD RI 1945 (1x50’) *Offline* | | | | 1x3 x50 | * Memahami definisi Kelembagaan Negara menurut UUD RI 1945 | | **Kriteria:**  Ketepatan dan penguasaan materi  **Bentuk penilaian:**   * Kemampuan dalam melakukan presentasi * Kemenarikan dalam melakukan presentasi | | | * Kemampuan mahasiswa dalam memahami Kelembagaan Negara menurut UUD RI 1945 | **3%** |
| 9 | Tes materi minggu ke 1 sampai dengan 8 | | UTS | | UTS Tatap Muka Penuh (*luring*) | | | | 1X4 X50” | UTS | | UTS | | | UTS | 20% |
| 10 | Pancasila sebagai Ideologi Nasional | | 1. Definisi Pancasila sebagai ideologi nasional 2. Fungsi Pancasila sebagai ideologi nasional   Proses terbentuknya Pancasila sebagai ideologi nasional | | **Bentuk :** Kuliah   * Tatap Muka Penuh (*luring*) (1x50’) **Asinkron** → video pembelajaran * Tatap Muka Penuh (*luring*) (1x50’) **Sinkron** → Vcon, diskusi   **Metode Pembelajaran:**   * *Contextual teaching and Learning (CTL)*   **Penugasan: Tugas : diskusi kelompok tentang** Pancasila sebagai Ideologi Nasional (1x50’) *Offline* | | | | 1x3 x50” | * Menguasai dan menjawab pertanyaan tentang Definisi, Fungsi dan Proses terbentuknya Pancasila sebagai Ideologi Nasional | | **Kriteria:**  Ketepatan dan penguasaan  **Bentuk penilaian:**   * Presentasi * Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab (afektif)   pertanyaan tentang Pancasila sebagai ideologi Nasional | | | * Kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menjelaskan Definisi, Fungsi dan Proses terbentuknya Pancasila sebagai Ideologi Nasional | **3%** |
| 11 | Ideologi Lain yang berkembang di dunia | | Definisi Ideologi lain yang berkembang di dunia | | **Bentuk :** Kuliah   * Tatap Muka Penuh (*luring*) (1x50’) **Asinkron** → video pembelajaran * Tatap Muka Penuh (*luring*) (1x50’) **Sinkron** → Vcon, diskusi   **Metode Pembelajaran:**   * *Contextual teaching and Learning (CTL)*   **Penugasan: diskusi kelompok tentang** ideologi lain yang berkembang di dunia (1x50’) *Offline* | | | | 1x3x50 | * Menguasai dan menjawab pertanyaan tentang Definisi, Fungsi dan Proses terbentuknya Pancasila sebagai Ideologi Nasional * Menguasai dan menjawab pertanyaan tentang Ideologi lain yang berkembang di dunia | | **Kriteria:**   * Ketepatan dan penguasaan   **Bentuk penilaian:**   * Presentasi * Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab (afektif) | | | * Kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menjelaskan tentang Ideologi lain yang berkembang di dunia | **3%** |
| 12 | Pancasila dan HAM | | Definisi Pancasila dan HAM | | **Bentuk :** Kuliah   * Tatap Muka Penuh (*luring*) (1x50’) **Asinkron** → video pembelajaran * Tatap Muka Penuh (*luring*) (1x50’) **Sinkron** → Vcon, diskusi   **Metode Pembelajaran:**   * *Contextual teaching and Learning (CTL)*   **Penugasan: diskusi kelompok tentang** definisi pancasila dan HAM (1x50’) *Offline* | | | | 1x3 x50” | Menguasai dan menjawab pertanyaan tentang Pancasila dan HAM | | **Kriteria:**  Ketepatan dan penguasaan  **Bentuk penilaian:**   * Presentasi * Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab (afektif)   pertanyaan tentang definisi pancasila dan HAM | | | * Kemampuan mahasiswa dalam mengimplentasikan metode komunikasi yang efektif dalam sebuah tim organisasi | **3%** |
| 13 | KUIS | | Evaluasi | | Tes Offline | | | | 1x3 x50 | **-** | | **-** | | | **-** | **10%** |
| 14 | Pelaksanaan HAM dalam UUD RI 1945 | | 1. Definisi Pelaksanaan HAM dalam UUD RI 1945 2. Karakteristik Pelaksanaan HAM dalam UUD RI 1945 | | **Bentuk :** Kuliah   * Tatap Muka Penuh (*luring*) (1x50’) **Asinkron** → video pembelajaran * Tatap Muka Penuh (*luring*) (1x50’) **Sinkron** → Vcon, diskusi   **Metode Pembelajaran:**   * *Contextual teaching and Learning (CTL)*   **Penugasan: diskusi kelompok tentang** pelaksanaan HAM dalam UUD RI 1945 (1x50’) *Offline* | | | | 1x3 x50 | - Menguasai dan menjawab pertanyaan tentang Definisi dan Karakteristik Pelaksanaan HAM dalam UUD RI 1945 | | **Kriteria:**  Ketepatan dan penguasaan  **Bentuk penilaian:**   * Presentasi * Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab (afektif)   pertanyaan tentang pelaksanaan HAM dalam UUD RI 1945 | | | Kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menjelaskan tentang Definisi negosiasi, Pendekatan negosiasi, Karakteristik negosiasi serta Langkah-langkah negosiasi | **3%** |
| 15 | Tindak Pidana Korupsi | | Definisi Tindak Pidana Korupsi  -Karakteristik Tindak Pidana Korupsi | | **Bentuk :** Kuliah   * Tatap Muka Penuh (*luring*) (1x50’) **Asinkron** → video pembelajaran * Tatap Muka Penuh (*luring*) (1x50’) **Sinkron** → Vcon, diskusi   **Metode Pembelajaran:**   * *Contextual teaching and Learning (CTL)*   **Penugasan: diskusi kelompok tentang** tindak pidana korupsi (1x50’) *Offline* | | | | 1x3 x50 | * Melakukan presentasi tentang Definisi dan Karakteristik Tindak Pidana Korupsi | | **Kriteria:**  Ketepatan dan penguasaan  **Bentuk penilaian:**   * Presentasi * Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab (afektif)   pertanyaan tentang tindak pidana korupsi   * Kemenarikan dalam melakukan presentasi | | | * Ketepatan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan * Ketepatan mahasiswa dalam melakukan presentasi proyek sistem informasi di depan forum dengan, dan mengemasnya menjadi sebuah presentasi yang baik dan menarik | **3%** |
| 16 | Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan | | Definisi Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan | | **Bentuk :** Kuliah   * Tatap Muka Penuh (*luring*) (1x50’) **Asinkron** → video pembelajaran * Tatap Muka Penuh (*luring*) (1x50’) **Sinkron** → Vcon, diskusi   **Metode Pembelajaran:**   * *Contextual teaching and Learning (CTL)*   **Penugasan: Tugas 5 diskusi kelompok tentang** Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan (1x50’) *Offline* | | | | 1x3 x50 | * Menguasai dan menjawab pertanyaan Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan | | **Kriteria:**  Ketepatan dan penguasaan  **Bentuk penilaian:**   * Presentasi * Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab (afektif)   pertanyaan tentang Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan | | | * Kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menjelaskan tentang moderatorasi dan notulensi | **3%** |
| 17 | UAS | | Evaluasi | | Ujian *Offline* | | | | 1x3 x50 | **-** | | **-** | | | **-** | **20%** |

**Lampiran 5 Tampilan Jadwal Perkuliahan**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

**POLITEKNIK NEGERI MALANG**

**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Jl. Soekarno Hatta No.09 Malang 65141 Telp. (0341) 404424 - 404425 Fax. (0341) 404420

laman: http://www.jti.polinema.ac.id

RISET, DAN TEKNOLOGI

**JADWAL PERKULIAHAN DOSEN**

**Dosen: Widaningsih Condrowardhani, SH, MH.** **SEM. GANJIL TA. 2022/2023**

Politeknik Negeri Malang, Jl. Soekarno Hatta No.09

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1**  7:00  7:50 | **2**  7:50  8:40 | **3**  8:40  9:30 | **7**  12:50  13:40 |  |  | **8**  13:40  14:30 | **9**  14:30  15:20 | **10**  15:30  16:20 | **11**  16:20  17:10 | **12**  17:10  18:00 |
| **Selasa** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pancasila RT07 (Lt5 B) SIB-1A /SIB-1B | |
| **Rabu** | Pancasila RT01 (Lt5 B) SIB-1C /SIB-1D | |  |  |  | Pancasila RT04 (Lt5 B) PL S-1A | | Pancasila RT07 (Lt5 B) TI-1C /TI-1D | |  |  |
| **Kamis** | Pancasila RT05 (Lt5 B) TI-1A /TI-1B | |  |  |  |  |  |  |  | Pancasila RT01 (Lt5 B) TI-1E /TI-1F | |
| **Jumat** |  | Pancasila  RT02 (Lt5 B)  TI-1I | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pancasila | Pancasila |

.



Malang, 24 Agustus 2022

Ketua Jurusan,

)

Rudy Ariyanto ST., MCs.

(

NIP. 197111101999031002



*Form JTI, Tgl Cetak: 24/08/2022 06:25:17*

1. Landasan Historis, Kultural, Yuridis dan Filosofis Pancasila, <http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/07/landasan-historis-kultural-yuridis-dan.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-1)
2. Aldi Arianta. Dkk. (2020). Tinjauan Pancasila Dari Segi Historis Kultural, Yuridis, Dan Filosofis. Makalah. Hlm. 3-4. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid. hlm. 4 [↑](#footnote-ref-3)
4. Herman Firdaus, Makalah Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, <https://www.blogbarabai.com/2014/10/makalah-pancasila-dalam-konteks-sejarah.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-4)
5. Herman Firdaus, Makalah Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Loc.cit. [↑](#footnote-ref-5)
6. Herman Firdaus, Makalah Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Loc.cit. [↑](#footnote-ref-6)
7. Herman Firdaus, Makalah Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Loc.cit. [↑](#footnote-ref-7)
8. Herman Firdaus, Makalah Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Loc.cit. [↑](#footnote-ref-8)
9. Herman Firdaus, Makalah Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Loc.cit. [↑](#footnote-ref-9)
10. Herman Firdaus, Makalah Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Loc.cit. [↑](#footnote-ref-10)
11. Herman Firdaus, Makalah Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Loc.cit. [↑](#footnote-ref-11)
12. Herman Firdaus, Makalah Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Loc.cit. [↑](#footnote-ref-12)
13. Herman Firdaus, Makalah Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Loc.cit. [↑](#footnote-ref-13)
14. Herman Firdaus, Makalah Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Loc.cit. [↑](#footnote-ref-14)
15. Herman Firdaus, Makalah Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Loc.cit. [↑](#footnote-ref-15)
16. Herman Firdaus, Makalah Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Loc.cit. [↑](#footnote-ref-16)
17. Herman Firdaus, Makalah Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Loc.cit. [↑](#footnote-ref-17)
18. Herman Firdaus, Makalah Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Loc.cit. [↑](#footnote-ref-18)
19. Herman Firdaus, Makalah Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Loc.cit. [↑](#footnote-ref-19)
20. Herman Firdaus, Makalah Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Loc.cit. [↑](#footnote-ref-20)
21. Herman Firdaus, Makalah Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Loc.cit. [↑](#footnote-ref-21)
22. Herman Firdaus, Makalah Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Loc.cit. [↑](#footnote-ref-22)
23. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat: Makna dan Karakteristiknya, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pancasila-sebagai-sistem-filsafat-makna-dan-karakteristiknya-1vqqzE8FTKb/full>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-23)
24. Edi Rohani. (2019). Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan. Jakarta: Almuqsith Pustaka. [↑](#footnote-ref-24)
25. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat: Makna dan Karakteristiknya. Loc.cit. [↑](#footnote-ref-25)
26. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat: Makna dan Karakteristiknya. Loc.cit. [↑](#footnote-ref-26)
27. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat: Makna dan Karakteristiknya. Loc.cit. [↑](#footnote-ref-27)
28. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat: Makna dan Karakteristiknya. Loc.cit. [↑](#footnote-ref-28)
29. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat: Makna dan Karakteristiknya. Loc.cit. [↑](#footnote-ref-29)
30. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasca Amandmen), <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-pasca-amandemen>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-30)
31. Permadi Suntama, Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa, <https://tirto.id/arti-penting-uud-negara-republik-indonesia-tahun-1945-bagi-bangsa-gjuM>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-31)
32. Rizky Adha mahendra, Pengertian Amandemen UUD 1945 Dan Cara Mengubah Konstitusi, <https://www.harianhaluan.com/pendidikan/pr-101164251/pengertian-amandemen-uud-1945-dan-cara-mengubah-konstitusi?page=all#:~:text=Lantas%2C%20apa%20yang%20dimaksud%20dengan,terperinci%20dari%20UUD%20yang%20asli>., diakses pada tanggal 20 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-32)
33. Rizky Adha mahendra, Pengertian Amandemen UUD 1945 Dan Cara Mengubah Konstitusi. Loc. cit. [↑](#footnote-ref-33)
34. Rifan Aditya, Amandemen UUD 1945, Tujuan, dan Beberapa Bentuk Perubahan Fundamentalnya, <https://www.suara.com/news/2020/12/11/084041/amandemen-uud-1945-tujuan-dan-beberapa-bentuk-perubahan-fundamentalnya?page=all>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-34)
35. Rifan Aditya, Amandemen UUD 1945, Tujuan, dan Beberapa Bentuk Perubahan Fundamentalnya. Loc.cit. [↑](#footnote-ref-35)
36. Rifan Aditya, Amandemen UUD 1945, Tujuan, dan Beberapa Bentuk Perubahan Fundamentalnya. Loc.cit. [↑](#footnote-ref-36)
37. Rifan Aditya, Amandemen UUD 1945, Tujuan, dan Beberapa Bentuk Perubahan Fundamentalnya. Loc.cit. [↑](#footnote-ref-37)
38. Rifan Aditya, Amandemen UUD 1945, Tujuan, dan Beberapa Bentuk Perubahan Fundamentalnya. Loc.cit. [↑](#footnote-ref-38)
39. Rifan Aditya, Amandemen UUD 1945, Tujuan, dan Beberapa Bentuk Perubahan Fundamentalnya. Loc.cit. [↑](#footnote-ref-39)
40. Rifan Aditya, Amandemen UUD 1945, Tujuan, dan Beberapa Bentuk Perubahan Fundamentalnya. Loc.cit. [↑](#footnote-ref-40)
41. Ilham Choirul Anwar & Yandri Daniel Damaledo (Ed), Mengenal apa itu Trias Politica yang diterapkan di pemerintahan Indonesia, <https://tirto.id/mengenal-apa-itu-trias-politica-yang-diterapkan-di-indonesia-f7Do>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-41)
42. Ilham Choirul Anwar & Yandri Daniel Damaledo (Ed), Mengenal apa itu Trias Politica yang diterapkan di pemerintahan Indonesia. Loc.cit [↑](#footnote-ref-42)
43. Ilham Choirul Anwar & Yandri Daniel Damaledo (Ed), Mengenal apa itu Trias Politica yang diterapkan di pemerintahan Indonesia. Loc.cit. [↑](#footnote-ref-43)
44. Ayu Ma’as, Pengertian Lembaga Negara Indonesia Dan Jenis-Jenisnya, <https://kids.grid.id/read/472896569/pengertian-lembaga-negara-indonesia-dan-jenis-jenisnya?page=all>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-44)
45. Ayu Ma’as, Pengertian Lembaga Negara Indonesia Dan Jenis-Jenisnya. Loc.cit. [↑](#footnote-ref-45)
46. Ayu Ma’as, Pengertian Lembaga Negara Indonesia Dan Jenis-Jenisnya. Loc.cit. [↑](#footnote-ref-46)
47. <https://www.gramedia.com/literasi/makna-pancasila-sebagai-ideologi-negara/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-47)
48. Sarah Nafisah, Pancasila Sebagai Ideologi Negara, Inilah Pengertian Dan Fungsinya Bagi Masyarakat Indonesia, <https://bobo.grid.id/read/082413123/pancasila-sebagai-ideologi-negara-inilah-pengertian-dan-fungsinya-bagi-masyarakat-indonesia?page=all>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-48)
49. Sarah Nafisah, Pancasila Sebagai Ideologi Negara, Inilah Pengertian Dan Fungsinya Bagi Masyarakat Indonesia. Loc.cit. [↑](#footnote-ref-49)
50. Asal Mula Lahirnya Pancasila Sebagai Ideologi Negara, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/asal-mula-lahirnya-pancasila-sebagai-ideologi-negara-1tVY7lUga3Y/full>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-50)
51. Wida Kurniasih, Idelogi: Pengertian, Fungsi, Sejarah dan Jenisnya, <https://www.gramedia.com/literasi/ideologi/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-51)
52. Wida Kurniasih, Idelogi: Pengertian, Fungsi, Sejarah dan Jenisnya. Loc.cit. [↑](#footnote-ref-52)
53. Wida Kurniasih, Idelogi: Pengertian, Fungsi, Sejarah dan Jenisnya. Loc.cit. [↑](#footnote-ref-53)
54. Wida Kurniasih, Idelogi: Pengertian, Fungsi, Sejarah dan Jenisnya. Loc.cit. [↑](#footnote-ref-54)
55. Wida Kurniasih, Idelogi: Pengertian, Fungsi, Sejarah dan Jenisnya. Loc.cit. [↑](#footnote-ref-55)
56. Besar, Hubungan Pancasila Dan Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia, <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pancasila-sebagai-landasarn-pengaturan-ham-di-indoensia/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-56)
57. Kristina, Ini Lho 10 Pasal dalam UUD 945 yang Mengatur Tentang HAM, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5713321/ini-lho-10-pasal-dalam-uud-1945-yang-mengatur-tentang-ham>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-57)
58. Kristina, Ini Lho 10 Pasal dalam UUD 945 yang Mengatur Tentang HAM. Loc.cit [↑](#footnote-ref-58)
59. Wahyono, Memahami Karakteristik Hak Asasi Manusia, <https://ham.go.id/2016/06/14/memahami-karakteristik-hak-asasi-manusia/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-59)
60. # Rendra Topan, HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN UUD 1945, <https://rendratopan.com/2019/08/28/hak-asasi-manusia-berdasarkan-uud-1945/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

    [↑](#footnote-ref-60)
61. Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 8. [↑](#footnote-ref-61)
62. Kartini Kartono, Patologi Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 80. [↑](#footnote-ref-62)
63. Eddy Suhartono, Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. http/www/google.com/korupsi, diakses pada tanggal 20 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-63)
64. Ibid., hal. 2. [↑](#footnote-ref-64)
65. <https://www.duniapengertian.com/2016/09/pengertian-korupsi-serta-karakteristik.html>, diakses pada tanggal 19 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-65)
66. <https://www.duniapengertian.com/2016/09/pengertian-korupsi-serta-karakteristik.html>, Loc.cit. [↑](#footnote-ref-66)
67. R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2005, hal. 30. [↑](#footnote-ref-67)
68. Masyarakat Transparansi Indonesia, http://www.transparansi.ot.id, diakses pada tanggal 20 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-68)
69. Ibid, hal. 1-2. [↑](#footnote-ref-69)
70. Fahri Zufikar, Makna Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan, Ini Penjelasannya, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5619788/makna-pancasila-sebagai-paradigma-pembangunan-ini-penjelasannya>, diakses pada tanggal 19 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-70)
71. Fahri Zufikar, Makna Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan, Ini Penjelasannya. Loc.cit [↑](#footnote-ref-71)